

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA
(Perspektif Akademisi FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SAPIA
NIM. 180801011

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2023 M /1445 H

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA
(Perspektif Aademisi FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam
Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)
Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

SAPIA
NIM. 180801011
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Kamaruzzaman.,M.Sh.
NIP.197809172009121006



Danil Akbar Taqwaddin, B.IAM.,M.Sc
NIDN.2008048903

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA
(Perspektif Akademisi FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juli 2023
8 Muharram 1445 H

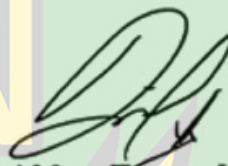
Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D.
NIP. 197809172009121006

Sekretaris



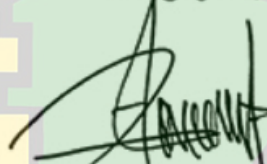
Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc.
NIDN. 2008048903

Penguji I,



Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D.
NIP. 198103162011011003

Penguji II,



Arif Akbar, M.A.
NIP. 199110242022031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sapia
NIM : 180801011
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pancasila Sebagai Ideologi Negara (Perspektif Akademisi Fisip Uin Ar-Raniry Banda Aceh)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggung jawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juli 2023

Yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL

3169EAKX429777325

Sapia

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur senantiasa selalu terpanjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat, taufik, hidayah serta karunianya yang tak terhingga kepada hamba-hambanya, sehingga dengan berkat nikmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pancasila Sebagai Ideologi Negara (Perspektif Akademisi FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh)”**. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyempurnakan akhlak manusia dan membawa kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.IP) yang ada pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-RANIRY Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih adanya kekurangan dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki. Tentunya kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis agar penulisan ini menjadi lebih baik. Dalam proses menyelesaikan penulisan skripsi ini, tentunya penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dalam hal ini penulis mengucapkan rasa terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua Ayahanda Mustafa (Alm) dan Ibunda Samiah, yang selalu senantiasa membimbing dan lantunan doa yang tiada henti-hentinya demi kelancaran pendidikan yang sedang ditempuh oleh anaknya.

2. Bapak Prof.Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
4. Ibuk Rizkika Lhena Darwin, S.IP., M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik, sekretaris prodi Ilmu Politik, serta seluruh dosen dan staf Ilmu Politik UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
5. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D, sebagai pembimbing I dan bapak Danil Akbar Taqwaddin, B.IAM.,M.Sc sebagai pembimbing II, yang telah memberikan waktunya dalam memberika arahan dan bimbingannya sehingga terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Sahabat dan teman-teman angkatan 2018 yang telah memberikan saran dan bantuannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi kecil dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Banda Aceh 14 Juli 2023
Penulis,

Sapia
NIM. 180801011

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informan Penelitian.....	32
-----------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

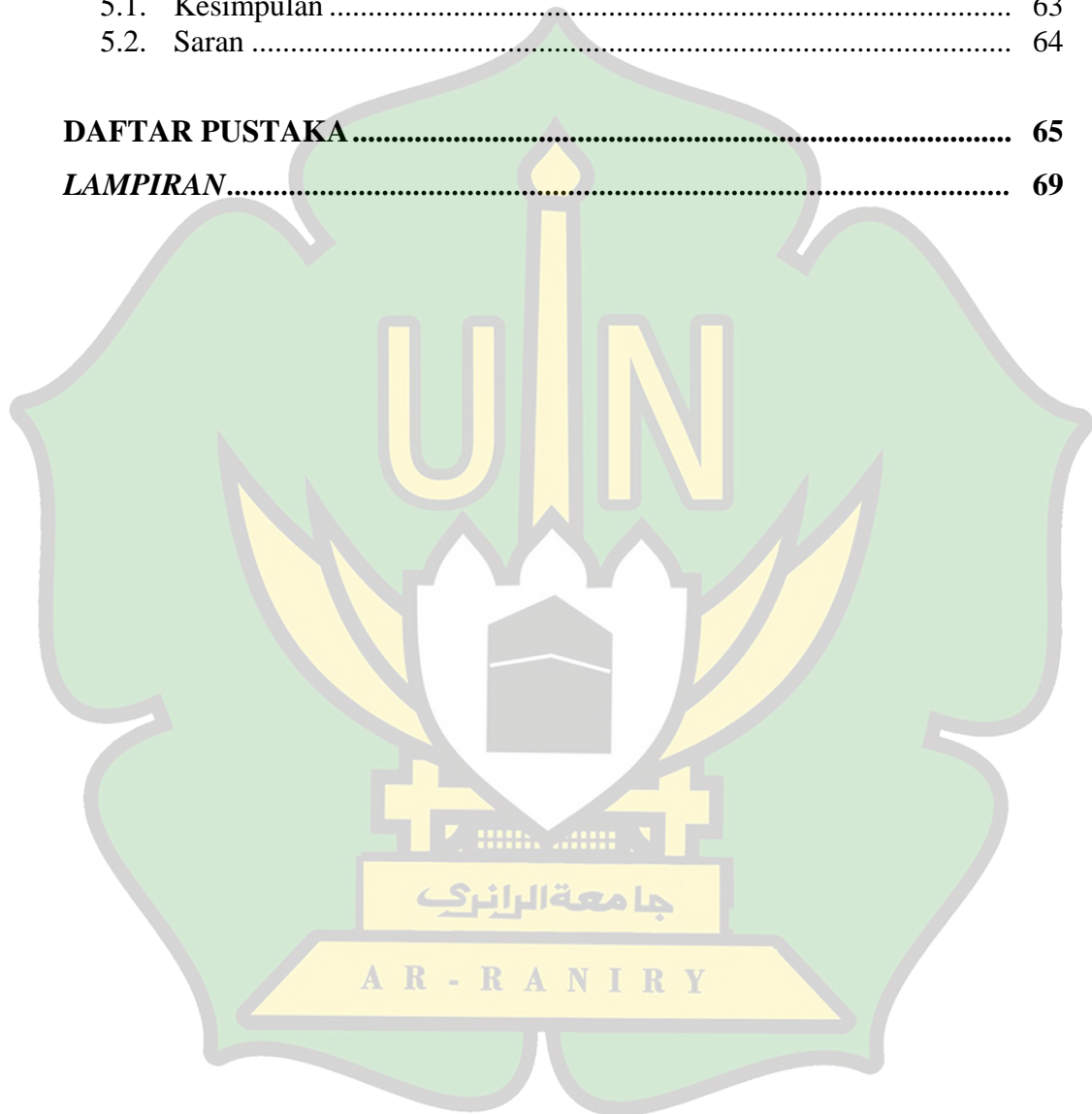
Lampiran I.Struktur Organisasi FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh.....	36
Lampiran II.Dokumentasi Penelitian	64
Lampiran III.Riwayat Hidup.....	71



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	
Error! Bookmark not defined.1	
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Kajian Terdahulu	13
2.2 Landasan Teori	17
2.2.1 Pengertian Perspektif	17
2.2.2. Ideologi	18
2.2.3. Pancasila sebagai ideologi	22
2.2.4 Globalisasi	27
2.2.5. Pancasila dalam Pusaran Globalisasi	30
2.2.6 Badan Pembina Ideologi Pancasila.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Pendekatan Penelitian	33
3.2. Lokasi Penelitian.....	34
3.3. Fokus Penelitian.....	34
3.4. Sumber Data.....	35
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6. Informan Penelitian.....	36
3.7. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1. Gambaran umum FISIP UIN Ar-Raniry.....	38
4.1.1. Profil FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh.....	38
4.1.2. Visi dan Misi FISIP UIN Ar- Raniry.....	39
4.1.3. Struktur Organisasi FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh.....	40
4.2. Perspektif Akademisi FISIP UIN Ar-Raniry Dalam Memandang Pancasila Sebagai Ideologi Negara.	41
4.2.1. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	43

4.3. Perspektif Akademisi FISIP UIN Ar-Raniry Memandang Tantangan Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Seiring Dengan Arus Globalisasi...	47
4.3.1 Relevansi Pancasila di Masa Depan	56
4.3.2 Akademisi sebagai Alat Transformasi Pendidikan dalam Menjaga Eksistensi Pancasila.	59
BAB V PENUTUP	63
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	69



ABSTRAK

Nama : Sapia
NIM : 180801011
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan / Ilmu Politik
Judul : Pancasila Sebagai Ideologi Negara (Perspektif Akademisi FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 26 juli 2023
Tebal Skripsi : 81 Halaman
Pembimbing I : Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D.
Pembimbing II : Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., Ph.D.

Kata Kunci : *Pancasila, Ideologi Negara, Akademisi, Globalisasi*

Pancasila adalah ideologi negara yang menjadi landasan filosofis bangsa Indonesia. Konsep dalam Pancasila menggabungkan nilai-nilai, prinsip dan tujuan yang menjadi pijakan bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan dalam lingkungan sehari-hari. Pancasila juga menjadi landasan untuk menghadapi arus informasi digital dan budaya asing yang terus berkembang dalam era globalisasi. Implementasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat sejauh ini memiliki capaian yang beragam. Di satu sisi, pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sudah sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang dasar. Namun, di sisi lain, ada hambatan dan permasalahan dalam menyelenggarakan Pancasila secara menyeluruh, seperti kurangnya pemahaman, konflik dan perpecahan, ketimpangan sosial dan ekonomi, tantangan terkait keadilan, serta dampak cepatnya pengaruh globalisasi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif akademisi FISIP UIN Ar-Raniry dalam memandang Pancasila sebagai ideologi negara dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah arus globalisasi yang terus berjalan hingga saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) akademisi FISIP UIN Ar-Raniry melihat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara merupakan representasi dari karakteristik masyarakat kita yang multikultural dan kedudukan Pancasila sebagai landasan hukum bernegara bersifat final dan mengikat. Dengan artian bahwa Pancasila menjadi kesepakatan bangsa Indonesia, dan mengikat kita semua untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. (2) tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah arus globalisasi harus menjadi perhatian serius bukan hanya bagi penggerak roda pemerintahan tetapi juga dari masyarakat sendiri sebagai upaya menjaga keutuhan Pancasila. Tantangan penerapan Pancasila bukan hanya berasal dari arus globalisasi tetapi juga dari arus kelokalan seperti isu identitas, agama, perpecahan dan sebagainya. Beberapa isu tersebut bertentangan dengan Pancasila sehingga mengakibatkan aktualisasi Pancasila semakin hari semakin minim. (3) peningkatan pendidikan dan penguatan pengawasan hukum menjadi langkah utama dalam menjaga keutuhan Pancasila dari berbagai tantangan yang berasal dari dalam maupun dari luar.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila secara resmi diumumkan sebagai dasar negara Indonesia yang akan menjadi panduan dalam pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Setelah diumumkan sebagai dasar negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila menjadi landasan filosofis dan ideologis bagi Indonesia. Prinsip-prinsipnya mencakup nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Pancasila kemudian menjadi identitas bangsa Indonesia dan menjadi panduan utama dalam pembentukan hukum, kebijakan, serta kehidupan berbangsa dan bernegara di negara ini.¹

Pancasila lahir menjadi sebuah instrumen bersama masyarakat Indonesia di berbagai lingkungan yang berbeda-beda serta landasan bernegara berdasarkan konstitusi yang berlaku. Pancasila telah hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia mulai dari orde lama, orde baru, sampai dengan saat sekarang ini masa reformasi. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap bait Pancasila telah mendefinisikan karakteristik dan keberagaman masyarakat Indonesia.

Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. sebagaimana yang dijelaskan dalam dalam “undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, “bahwa

¹ <https://www.kemdikbud.go.id/>

pancasila menjadi sumber hukum dari segala sumber hukum, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan kepastian hukum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan”.²

Winarno, menyatakan bahwa Pancasila merupakan dasar dan landasan utama pendidikan karakter bangsa. Artinya, pancasila menjadi sumber rujukan dan sekaligus menjadi tujuan dalam pembangunan pendidikan dan karakter bangsa. Berkarakter pancasila berarti bangsa Indonesia memiliki ciri dan watak humanis, nasionalis, demokratis, religius serta mengedepankan kepentingan bersama rakyat.³

Menurut Munir, MBM, Umi Salamah dan Suratman. Menjelaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. atau bisa dipahami Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Jadi bisa dipahami bahwa pancasila menjadi asas kerohanian hukum Indonesia sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang kemudian dijadikan pokok pikiran bersama dalam melahirkan kebijakan-kebijakan di kemudian hari.⁴

Pancasila sebagai dasar negara ditegaskan dalam ketetapan MPR No.XVIII/MPR/1998 tentang penghapusan P4 dan menetapkan pancasila sebagai dasar negara. Dalam ketetapan ini dinyatakan bahwa pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 adalah dasar negara dari negara kesatuan republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsekuen

² UU No 12 tahun 2011.

³ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), hlm. 5-7

⁴ Munir, MBM, Umi Salamah, dan Suratman. (2015) *Pendidikan Pancasila*. Malang: Mardani Media

dan konsisten. Pada penjelasan ketetapan ini juga dijelaskan bahwa kedudukan pancasila sebagai dasar negara yang di dalamnya mengandung makna ideologi nasional, cita-cita, dan tujuan negara.⁵

Menilik sejarah perjalanan Pancasila, mulai dari orde lama sampai dengan masa reformasi sekarang ini, pancasila mengalami masa yang sangat kacau, yang berujung pada penentangan dari berbagai kelompok dan organisasi masyarakat tertentu yang ingin menghilangkan ideologi negara republik indonesia. Gejolak politik yang melibatkan para penguasa pemerintahan dan para kelompok-kelompok yang ingin menghapus sistem Pancasila demi kepentingan mereka sendiri. Tentunya bagi bangsa Indonesia yang patuh terhadap kandungan Pancasila, tidak ada keraguan mengenai ketetapan Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara.

Pada era Orde Lama (Soekarno), pancasila masih dalam tahapan ideologisasi atau tahapan dalam tahapan membangun pancasila menjadi ideologi negara sebagai keyakinan dan kepribadian bersama bangsa Indonesia. Masa ini pula pro dan kontra terjadi antara kelompok islam dengan pancasila, dimana kelompok islam merasa kecewa atas penghapusan piagam Jakarta dan pembukaan undang-undang dasar 1945. Era Orde Baru (Soeharto), Pancasila mengalami gejolak politik yang amat kacau, munculnya G 30 S/PKI pada tahun 1965 menjadikan keadaan politik era demokrasi ini berkembang menjadi otoritarian. Sampai pada era reformasi, pancasila mulai menata diri dengan berbagai format baru dan mulai melakukan perbaikan di segala bidang kehidupan. Namun,

⁵ Ronto,S.Pd.I.,M.Si, *Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara* (Jakarta timur: PT Balai Pustaka, 2012), hlm.11.

pancasila di era ini tidak jauh beda dengan era sebelumnya. Dimana masih adanya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) bahkan sampai dengan hari ini budaya tersebut masih berlangsung.

Tentunya Penting bagi rakyat indonesia memahami pentingnya pancasila sebagai falsafah negara. 76 tahun Indonesia merdeka, apakah bangsa Indonesia memahami artian pancasila sebagai ideologi negara atau mungkin pernahkah mereka hanya sekedar mendengarnya?

Berdasarkan pengamatan tentang pancasila, penulis tentunya mengikuti perkembangan pancasila. Dimana masih ada orang-orang di berbagai pelosok negeri ini yang masih belum mengetahui dan belum paham akan kedudukan pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Penulis sendiri melihat bahwa pancasila sebagai ideologi negara merupakan hal yang kompleks dan terus berada dalam dinamika perubahan dan interpretasi. Pancasila sendiri berperan sebagai panduan dalam berbagai aspek kehidupan negara, termasuk pembuatan undang-undang, kebijakan pemerintah, dan sistem pendidikan. Namun, karena interpretasi dan implementasinya dapat beragam sesuai dengan pandangan dan pemahaman yang berbeda-beda dari masyarakat, seringkali terjadi perdebatan tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya baik itu dibidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan perkembangan globalisasi.

Dalam hal ini pula, penulis ingin mengetahui bagaimana Perspektif Akademisi FISIP UIN Ar-Raniry dalam menanggapi permasalahan ini.

Di tengah era globalisasi sekarang ini, dengan perkembangan dunia tanpa batas (borderless world) dan pengaruh dunia maya yang sangat erat kaitannya

dengan lingkungan manusia, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Tentunya hal ini bisa saja mempengaruhi masyarakat kita dengan ideologi-ideologi asing tersebut. Bahkan sebagian dari mereka ada yang sudah berpandangan dengan pola pikir ideologi luar seperti materialisme, hedonisme, konsumerisme. kita bisa melihat terus-menerus bagaimana gencarnya budaya luar masuk ke dalam masyarakat kita, misalnya di media sosial yang sering kita lihat. “Ketahanan ideologi pancasila diuji ketika dunia masuk pada era Globalisasi di mana banyaknya ideologi alternatif merasuk ke dalam segenap sendi-sendi melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa”.⁶

Sejak Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka, mereka sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila berperan penting dalam menentukan arah dan tujuan bangsa Indonesia, dan mantra Bhinneka Tunggal Ika sangat penting dalam mencapai persatuan dan tujuan bersama dalam mencapai tujuan nasional.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, kerakyatan, supremasi hukum, dan ketuhanan yang maha esa, memungkinkan setiap individu dan kelompok dalam masyarakat untuk merasa diakui dan dihargai. Pancasila juga menekankan pada semangat gotong royong dan solidaritas sosial. Nilai-nilai ini mengarahkan masyarakat Indonesia untuk saling membantu dan bekerja sama dalam membangun bangsa. Pancasila

⁶ Hanum,F.F (2019). Pendidikan Pancasila Bagi Generasi Milenial. Dalam A.Wahyudi,R.Nababan, & F.Rahman (editor), *Prosiding Seminar Nasional: Reaktualisasi Konsep Kewarganegaraan Indonesia; Digital Library, 15 Oktober 2019* (hlm.72-81). Medan: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.

memperkuat kesadaran bahwa kepentingan bersama lebih penting daripada kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Pancasila berperan lebih luas sebagai fondasi untuk kemajuan dan kesinambungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip Pancasila seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan, membentuk landasan yang mendasari pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pancasila tidak hanya menjadi ideologi negara semata, melainkan juga mencerminkan identitas dan persatuan masyarakat Indonesia yang memiliki kemajemukan.

Dalam konteks sosial dan politik Indonesia, Pancasila memegang peran sentral dalam menjaga persatuan, keragaman, dan harmoni masyarakat. Nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, kerakyatan, supremasi hukum, dan ketuhanan yang maha esa, menjadi fondasi yang kuat untuk membangun kesepakatan bersama dalam mencapai tujuan nasional.

Membandingkan Pancasila dengan ideologi negara lainnya juga dapat memberikan wawasan yang berharga dalam memahami keunikan Pancasila dan perbedaannya dengan ideologi-ideologi negara lain. Dalam konteks globalisasi dan multikulturalisme, memahami implementasi dan relevansi Pancasila sebagai ideologi negara dapat memberikan pembelajaran berharga bagi negara-negara lain yang memiliki keragaman sosial dan budaya.

Pancasila juga memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan publik di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman dalam proses pembuatan kebijakan yang adil, berkeadilan, dan berlandaskan pada kepentingan

nasional. Menganalisis dampak Pancasila dalam pembuatan kebijakan dapat membantu memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata.

Dengan demikian dapat kita pahami bersama bahwa kandungan nilai-nilai pancasila memang mencerminkan dan mewakili ciri masyarakat Indonesia yang majemuk. Pancasila dirancang sebagai dasar negara Indonesia dengan tetap memperhatikan keberagaman yang ada di Indonesia. Melalui nilai-nilai yang dikandungnya, Pancasila memberikan kerangka untuk menghormati dan memajukan keragaman budaya, agama, suku, dan bahasa yang ada di Indonesia

Nilai-nilai seperti persatuan, kesetaraan, keadilan, dan martabat manusia yang terdapat dalam Pancasila mencerminkan komitmen untuk membangun harmoni dalam masyarakat yang majemuk. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi instrumen penting untuk mempromosikan multikulturalisme dan menjaga kesatuan dalam keragaman di masyarakat Indonesia dalam arus perkembangan globalisasi.

Namun demikian, meskipun Pancasila yang ditetapkan oleh undang-undang kita dapat menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat, namun pengamalan dan penerapannya tidak selalu optimal di masyarakat. Fenomena dan permasalahan tersebut masih muncul hingga saat ini, seperti korupsi yang mencerminkan masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan pemerintah, baik daerah maupun pusat, tentang amanat konstitusi kita dalam kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain masalah diskriminasi, kesenjangan sosial, kelompok intoleran, masalah lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Berdasarkan uraian di atas, penulisan skripsi ini bertujuan untuk menggali sejauh mana kandungan nilai-nilai Pancasila berjalan di tengah masyarakat serta relevansinya dalam konteks perkembangan zaman dengan melihat tantangan yang dihadapi Pancasila dalam membendung pengaruh yang dapat meruntuhkan nilai Pancasila baik dari dalam maupun dari luar.

Penulisan ini menjadi sangat penting untuk dilakukan, mengingat pentingnya peran ideologi negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta melihat sejauh mana pemahaman dan penerapan kandungan nilai Pancasila di tengah masyarakat. Penulisan ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran kebangsaan, memajukan masyarakat, dan mencapai cita-cita bersama sebagai bangsa yang maju dan beradab.

Pada konteks subjek, penelitian ini meletakkan Akademisi FISIP UIN Ar-Raniry sebagai subjek kajian. FISIP UIN Ar-Raniry sendiri lahir pada tahun 2014 setelah berubah status dari IAIN Ar-Raniry kepada UIN Ar-Raniry. Alasan memilih akademisi FISIP UIN Ar-Raniry sebagai subjek pada penelitian ini adalah karena akademisi merupakan bagian dari *civil society* yang memiliki kapasitas, wawasan luas, logis, kritis dan objektif terhadap suatu kondisi sosial dan relevansi dengan program studi pada FISIP UIN Ar-Raniry yang juga memiliki kurikulum ajaran tentang Pancasila.

Keberadaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan diharapkan menjadi solusi dalam menyikapi berbagai persoalan sosial politik dan pemerintahan yang terjadi di Aceh, perubahan paradigma pemerintah daerah, persoalan pembangunan sosial dan pemerintahan maka pihak pengelola UIN pun

tergugah untuk membuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan dengan dua program studi yaitu Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Politik yang berdasarkan pada surat mandate Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 384/E.E2/DT/2014 tanggal 15 April 2014 dan surat kesediaan Rektor Nomor Un.07/R/PP.00.9/1656/2014 tanggal 22 April 2014. Dalam meningkatkan kualitas output mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan telah mengikuti arahan penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI), pada jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Administrasi Negara.

Jumlah Akademisi pada FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh sampai saat ini sebagai berikut:

- Prodi Ilmu Administrasi Negara sebanyak 10 orang, diantaranya 7 (laki-laki) dan 3 (perempuan).
- Prodi Ilmu Politik sebanyak 10 orang, diantaranya 7 (laki-laki) dan 3 (perempuan).⁷

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 dalam Pasal (1) tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa *“Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”*.⁸

⁷ <http://fisip.uin.ar-raniry.ac.id/> , diakses pada 5 maret 2023.

⁸ UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa penelitian ini menarik untuk dibahas lebih lanjut mengenai perspektif Akademisi FISIP UIN Ar-Raniry dalam memandang Pancasila sebagai ideologi negara seiring dengan arus globalisasi yang terus berjalan hingga saat ini. Tentunya dalam penulisan ini penulis merasa masih jauh dari kata sempurna, jadi mohon kiranya dikoreksi untuk kesempurnaan penulisan karena penulis juga masih dalam proses tahapan belajar.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perspektif Akademisi FISIP UIN Ar-Raniry dalam memandang Pancasila sebagai ideologi negara?
2. Bagaimana perspektif Akademisi FISIP UIN Ar-Raniry memandang tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila seiring dengan arus globalisasi yang terus berjalan hingga saat ini?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam hal ini tentunya memberikan penjelasan dari topik permasalahan yang akan diteliti yaitu, sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan mengetahui perspektif Akademisi UIN Ar-Raniry dalam memandang Pancasila sebagai ideologi negara.
2. Mendeskripsikan perspektif Akademika FISIP UIN Ar-raniry dalam melihat tantangan penerapan nilai-nilai pancasila seiring dengan arus globalisasi yang terus berjalan hingga saat ini.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya diharapkan bisa memberikan manfaat kepada pembacanya secara langsung maupun tidak langsung tentang hasil tulisan didalamnya. Adapun manfaat penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ialah manfaat yang mampu memberikan sumbangan secara ilmiah dan pengetahuan wawasan. Dalam hal ini mampu memberikan tambahann ilmu bagi peneliti dan kepada pembaca khususnya mengenai ideologi pancasila di tengah arus globalisasi yang terus berjalan hingga saat ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Kemampuan dalam meningkatkan penlitian, sebagai wawasan dalam melakukan penulisan karya ilmiah dan pengalaman langsung dalam melihat perkembangan ilmu pengetahuan pancasila dan lainnya.

- b. Bagi Milenial

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap kaum milenial kedepannya tentang pentingnya menjaga keutuhan pancasila, tetap menjadikan pancasila sebagai falsafah negara dalam mempersatukan perbedaan kultur dan budaya Indonesia yang telah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan terdahulu.

- c. Bagi lembaga pendidikan

Sebagai sumber wawasan serta pertimbangan dalam upaya mengajarkan nilai-nilai dalam pancasila khususnya di lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD) hingga ke jenjang lebih tinggi seperti universitas dan lainnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Silverius Y Soeharso dan Aisyah (2021), dalam jurnalnya yang berjudul “Hubungan Persepsi dan Sikap Civitas Akademika Universitas Pancasila terhadap Kesesuaian Peraturan Perundangan dengan Pancasila”. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran persepsi dan sikap civitas akademika terhadap kesesuaian peraturan perundangan dengan Pancasila. Responden dalam penelitian ini adalah civitas akademika dari Universitas Pancasila dan Universitas Indonesia dengan menggunakan pengambilan sampel dengan metode purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis korelasional dengan menggunakan teori persepsi dari Sarwono (2009) dan teori sikap menurut Oskamp dan Schultz (2005).

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan signifikan antara persepsi dan sikap civitas akademika terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan dengan Pancasila, sehingga dapat disimpulkan bahwa civitas akademika secara umum memahami bahwa terdapat ketidaksesuaian antara peraturan perundangan dengan Pancasila. Dengan rincian sebagai berikut, sebanyak 57,3% civitas memiliki sikap positif dan 42,7% civitas

lainnya memiliki sikap negatif terhadap kesesuaian peraturan perundangan dengan Pancasila.⁹

Erna Setyowati (2010), dalam skripsinya yang berjudul “Persepsi dan Aspirasi terhadap pendidikan Pancasila di perguruan tinggi (studi pada Dosen dan Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui persepsi Dosen dan Mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila di fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan mengetahui aspirasi Dosen dan Mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sample atau sampel yang bertujuan. Penelitian ini menggunakan teori dari Vincent Nugroho (2008: 51) tentang persepsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi dosen tentang pendidikan Pancasila di perguruan tinggi sebagai berikut. eksistensi pendidikan Pancasila sebagai matakuliah di perguruan tinggi saat ini sudah hilang, sedangkan pendidikan Pancasila sebagai substansi nilai masih tetap eksis. Pendidikan Pancasila dalam substansi nilai di perguruan tinggi terdapat beberapa permasalahan, diantaranya masalah penanaman nilai, terbatasnya sumber informasi referensi,

⁹ Silverius Y Soeharso, Aisyah, *Hubungan Persepsi dan Sikap Civitas Akademika terhadap Kesesuaian Peraturan Perundangan dengan Pancasila*, Vol. 12, No.1, Juni 2021, hlm. 53-64.

rendahnya motivasi dalam perkuliahan, dan mindset terhadap pendidikan tentang Pancasila cenderung negatif.¹⁰

Selanjutnya, kajian oleh Tatar Bonar Silitonga (2020) dengan judul “Tantangan Globalisasi, Peran dan Pentingnya dalam Mencapai Nilai-Nilai Ideologi Negara”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh globalisasi, peran negara, dan implikasinya terhadap aktualisasi nilai-nilai ideologi negara bagi warga negara Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam memahami permasalahan yaitu deskriptif analisis dengan studi kualitatif.

Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai globalisasi yang mempengaruhi pemikiran, sikap, dan perilaku sebagian warga negara yang didukung dengan konsistensi, ketegasan dan penguatan peran pemerintah dalam merawat nilai-nilai kebersamaan. Selain itu juga berimplikasi untuk meredam eskalasi dan kegiatan yang menjurus pada perilaku yang menonjolkan sentiment primordial serta berimplikasi memantapkan persepsi warga negara tentang pentingnya ideologi negara. Walaupun tidak langsung mengakselerasikan masyarakat mengaktualisasikan nilai-nilai ideologi negara secara signifikan.¹¹

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Kemiripan dengan penelitian tersebut adalah sama-sama menggunakan teknik pengambilan sampel yang sama dengan metode purposive sampling dan objek penelitian yang sama yaitu pada akademisi kampus. Sedangkan yang membedakannya, dalam penelitian tersebut

¹⁰ Erna Septomowati, *Persepsi dan Aspirasi terhadap pendidikan Pancasila di perguruan tinggi (studi pada Dosen dan mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta)*, (Surakarta : FKIP-USM, 2010)

¹¹ Tatar Bonar Silitonga, *Tantangan Globalisasi, peran negara, dan implikasinya terhadap aktualisasi nilai-nilai ideologi negara*, Vol.17, No. 1 Januari 2020, hlm. 15-28.

fokus penelitiannya terhadap kesesuaian peraturan perundang-undang dengan dengan Pancasila, metode penelitian menggunakan analisis korelasional, penggunaan teori yang berbeda dan lokasi penelitian yang beda.

2. Kesamaan dengan penelitian ini yaitu, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif, penggunaan teknik sampling yang sama dalam menentukan sampel penelitian, dan teknik analisis data. dan hal yang membedakannya adalah, penelitian ini berfokus pada eksistensi pendidikan Pancasila sebagai matakuliah pada perguruan tinggi yang sudah mulai pudar, sedangkan pendidikan Pancasila sebagai substansinya masih tetap eksis, penggunaan teori yang berbeda dan lokasi penelitian yang berbeda juga.
3. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode yang sama serta analisis data yang sama, sedangkan yang membedakannya adalah penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh globalisasi, peran negara dan implikasi terhadap aktualisasi nilai-nilai ideologi bagi warga negara indonesia, tidak menggunakan pengambilan sampel secara purpose sampling dan lokasi penelitian yang berbeda.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Perspektif

Perspektif merupakan cara pandang atau pengetahuan seseorang dalam menyikapi suatu masalah yang terjadi di sekitarnya¹². menurut Ardianto & Q-Anees, perspektif digambarkan sebagai cara pandang seseorang dalam menilai sesuatu yang dapat dijelentrehkan baik itu secara lisan ataupun secara tulisan.¹³

Sementara Suhandji dan Waspada, Mengemukakan bahwa perspektif adalah cara pandang atau wawasan untuk melihat dunia saat ini sangat dipengaruhi oleh arus global, sehingga semua bangsa menjadi saling ketergantungan, saling mempengaruhi dan saling berhubungan dengan berbagai aspek kebudayaan, sistem, ekologi, politik, ekonomi dan teknologi.¹⁴

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), perspektif diartikan sebagai cara memandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar dan tinggi) pada bidang datar.perspektif juga memiliki makna lain yaitu sudut pandang terhadap peristiwa yang ada.¹⁵

Definisi perspektif tentu saja didasarkan pada objek kajian tertentu, artinya perspektif tidak hanya harus melibatkan pada fenomena-fenomena sosial, politik ekonomi dan lainnya, melainkan juga dalam mengkomunikasikan objek berupa benda, ruang, dan lingkungan yang terlihat oleh seseorang ke dalam bidang datar. Dengan memahami perpspektif diharapkan kepada pembaca mampu dalam

¹² Suhandji, (2004). *Modernisasi dan Globalisasi; Studi Pembangunan dalam Perspektif Global*. (Bandung, Insan Cendikia), hlm. 27.

¹³ Ardianto, E., & Anees, B.Q. (2007) *Filsafat Ilmu Komunikasi*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media), hlm. 83.

¹⁴ Suhandji & Waspada TS, (2004), *Administrasi Pemerintahan Desa*. (Yogyakarta: Graha Ilmu). Hlm.-

¹⁵ <http://kbbi.web.id/perpspektif.html> diakses pada tanggal 11 maret 2023.

menyikapi pancasila sebagai ideologi negara di tengah arus globalisasi yang terus berjalan hingga saat ini.

Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sering melihat berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi secara langsung di lingkungan sekitar dan setelah peristiwa itu terjadi akan muncul berbagai perspektif orang-orang terhadap peristiwa tersebut. perspektif ini kemudian juga memungkinkan terjadinya perbedaan seseorang dalam menggunakan teori dalam melakukan pengkajian serta dalam hal menafsirkan fenomena yang telah diteliti.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perspektif adalah sekumpulan asumsi dan keyakinan yang membentuk pandangan seseorang terhadap suatu hal. Perspektif ini memengaruhi cara pandang seseorang secara khusus. Selain itu, perspektif juga dapat dianggap sebagai kerangka kerja konseptual yang terdiri dari nilai-nilai dan gagasan tertentu. Perspektif ini memandu individu dalam menentukan elemen-elemen yang relevan dari konsep yang dipilih untuk dipertimbangkan secara rasional.

2.2.2. Ideologi

Secara etimologi, istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu "*eidos*" dan "*logos*". *Eidos* berarti idea, gagasan, konsep ataupun cita-cita, sedangkan *logos* berarti ilmu, ajaran atau paham. Jadi, bisa dipahami ideologi adalah ilmu atau ajaran tentang idea-idea, gagasan-gagasan dan cita-cita tertentu. Kemudian ideologi berdasarkan makna yang terkandung didalamnya yaitu suatu ilmu atau ajaran yang mengandung ide-ide atau cita-cita yang bersifat tetap dan sekaligus merupakan dasar, pandangan ataupun paham.

Larrain, dalam artikelnya tentang “*The Concept of Ideology*” menjelaskan bahwa “*Ideology as a set of beliefs*” yaitu setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki suatu sistem kepercayaan mengenal sesuatu yang dipandang bernilai dan menjadi kekuatan motivasi bagi perilaku individu atau kelompok masyarakat. Nilai nilai yang dipandang itu sebagai cita-cita yang menjadi landasan bagi cara pandang, cara pikir, dan cara tindak seseorang atau bangsa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa ideologi adalah seperangkat sistem nilai yang diyakini kebenarannya oleh suatu bangsa dan digunakan sebagai dasar untuk menata masyarakat dalam suatu negara.¹⁶

Istilah ideologi dicetuskan oleh Antoine Destutt Tracy (1757-1836), yang merupakan ahli filsafat dari perancis. Menurutnya, ideologi merupakan cabang filsafat yang disebut science de ideas (sains tentang ide). Selanjutnya pada tahun 1796, ia mendefinisikan ideologi sebagai ilmu tentang pikiran manusia yang mampu menunjukkan jalan yang benar menuju masa depan.

Pengertian ideologi dari suatu ilmu tentang ide menjadi istilah yang bercorak politis lahir seiring dengan tertibnya tulisan Karl Marx dan Friedrich Engels, *The German Ideology* (1846). Dalam bukunya, Marx yang menyorot masyarakat kapitalis. Mengemukakan bahwa ideologi lahir dari sistem masyarakat yang terbagi dalam kelas-kelas. Kelas penguasa menguasai sarana-sarana produksi (material) dan mengontrol produk-produk mental seperti ide-ide dan keyakinan-keyakinan. Kelas penguasa pula yang mengatur produksi dan

¹⁶ Larrain, Jorge. Konsep ideologi, (di indonesiakan oleh Ryadi Gunawan dari buku *The Concept of Ideology*. Yogyakarta:LKPSM, 1997), hlm. -

distribusi ideologi hingga akhirnya ide atau ideologi kelas penguasalah yang menguasai jamannya (Ball dan Dagger (ed.),1995:6).

Yang menarik dari pandangan Marx ialah bahwa dia tak pernah menyebut ide-idenya sebagai ideologi melainkan sebagai sosialisme ilmiah. Baru kemudian para pengikutnya (kelompok Marxis) menyebut pemikiran Marx sebagai ideologi. Pengikut Marx seperti Lenin dan Antonio Gramsci menunjukkan minat besar terhadap kajian Marx tentang ideologi tersebut. dapat kita simpulkan bahwa menurut Marx ideologi itu alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan dalam masyarakat.¹⁷

Kemudian Lenin menggambarkan ideologi sebagai ide-ide yang berasal dari kelas sosial tertentu yang berfungsi untuk mendukung kepentingan-kepentingan kelas sosial tersebut. dengan kerangka berfikir ini maka baik kaum borjuis maupun kaum proletar memiliki ideologi masing-masing¹⁸.

Niccollo Machiavelli menggambarkan ideologi sebagai pengetahuan mengenai cara menyembunyikan kepentingan, memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dengan memanfaatkan konsepsi keagamaan dan tipu daya. Artinya ideologi menjadi sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa.

Pentingnya ideologi dalam konteks negara dapat dilihat melalui peran yang dimainkannya. Fungsi ideologi itu sendiri bagi suatu negara meliputi: pembentukan identitas dan karakteristik khas suatu bangsa, menyatukan perbedaan yang ada menjadi kesatuan, mengatasi konflik dan ketegangan sosial,

¹⁷ Rowland Bismark Fernando Pasaribu, *Pancasila Sebagai Ideologi Nasional*, (2013) hlm. 59-60

¹⁸ Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1978).

serta membentuk solidaritas dengan mengangkat nilai-nilai yang tinggi dari berbagai perbedaan. Ideologi berperan dalam membentuk identitas suatu bangsa dengan menggambarkan nilai-nilai, prinsip, dan tujuan bersama yang menjadi dasar bagi kehidupan bersama masyarakat. Ideologi juga berfungsi untuk menyatukan perbedaan yang ada dalam suatu negara dengan memberikan landasan yang kuat untuk kesatuan dan persatuan. Melalui ideologi, berbagai kelompok sosial, etnis, agama, dan budaya dapat ditempatkan dalam kerangka nilai-nilai yang bersama-sama dihormati dan dijunjung tinggi.

Selain itu, ideologi juga berperan dalam mengatasi konflik dan ketegangan sosial. Dengan memiliki ideologi yang dianut secara bersama, negara dapat mengatasi perbedaan pandangan, kepentingan, dan tujuan yang mungkin timbul di antara anggota masyarakatnya. Ideologi menjadi pijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan individu dan kelompok dengan kepentingan bersama serta memberikan arah yang jelas dalam penyelesaian konflik.

Ideologi juga berfungsi sebagai pembentuk solidaritas dengan mengangkat nilai-nilai yang tinggi dari berbagai perbedaan yang ada. Ideologi negara mendorong masyarakat untuk saling menghormati, bekerja sama, dan berkomitmen pada tujuan bersama yang terkandung dalam ideologi tersebut. Solidaritas yang tercipta melalui ideologi memungkinkan adanya kebersamaan dalam menghadapi tantangan dan memajukan bangsa.¹⁹

¹⁹ Rini Setyowati, Buyung, Dewi Mariana, Mertika. *Pendidikan Pancasila*, (STKIP Karawang: Lakeisha), 29 Januari 2020, Hlm 22.

Dengan demikian, ideologi memiliki peran yang penting dalam membentuk, menyatukan, dan mengarahkan negara serta masyarakatnya. Melalui fungsi-fungsi tersebut, ideologi menjadi instrumen yang kuat dalam membangun identitas nasional, mengatasi konflik sosial, serta membentuk solidaritas di tengah perbedaan yang ada

Dapat dipahami bahwa ideologi dapat dianggap sebagai visi yang luas serta cara dalam memberikan pandangan. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak yang di diaplikasikan pada masalah publik sehingga menjadikan konsep ini sebagai intisari politik. Kemudian secara umum, ideologi dipahami sebagai suatu kumpulan ide-ide dasar, gagasan-gagasan, pegangan bersama, keyakinan dan juga kepercayaan yang bersifat sistematis serta memberikan arah yang ingin dicapai dalam tujuan hidup berbangsa dan bernegara.

2.2.3. Pancasila sebagai ideologi

Bagi masyarakat Indonesia, pancasila dapat dianggap sebagai hal yang sakral. Dimana pancasila menjadi rujukan atau dasar dalam kehidupan bermasyarakat dalam berbagai aspek. Dalam pancasila, kita bisa mengamalkan nilai-nilai yang menjadi pegangan bangsa dalam kehidupan sehari-hari. pancasila sendiri merupakan suatu ideologi yang mengandung sistem filsafatnya sendiri yang bertitik tolak dengan teori-teori filsafat pada umumnya. Pancasila lahir dan dikembangkan oleh pendiri bangsa dan negara sehingga Indonesia dapat bersatu berdasarkan pancasila dan kebhinekaan serta dengan pancasila pula, Indonesia memiliki identitas bangsa yang khas.

Pembentukan negara juga ditujukan sebagai alat politik untuk mencapai tujuan polity (masyarakat politik) yang terbaik atau ed dam onia (versi Plato dan Aristoteles), atau dengan kata lain bertujuan menciptakan keadaan agar rakyat dapat memperoleh berbagai keinginannya secara hak dan semaksimal mungkin. Negara harus menjadi tempat yang memberikan perkembangan dan menyelenggarakan daya cipta dengan sebebas-bebasnya. Pada akhirnya, tujuan akhir dari negara ialah memberikan tempat dan menghadarkan kebahagiaan bagi rakyatnya atau bonum publicum, common good, commonwealth.²⁰

Secara umum tujuan sebuah negara yang penting dicapai adalah:

1. Melindungi masyarakat dan bangsa dari berbagai bahaya ancaman dan kehancuran yang datang dari dalam ataupun dari luar.
2. Membentuk dan menegakkan hukum untuk keadilan antar masyarakat
3. Mempertinggi dan menyelenggarakan kesejahteraan umum dan memajukan kebudayaan.²¹

Pancasila sebagai sebuah ideologi harus dapat berperan dalam menjamin bahwa tujuan negara Indonesia dapat tercapai. Negara Indonesia adalah organisasi tertinggi bagi seluruh rakyatnya, sehingga penyelenggaraan harus dapat dirancang secara tepat. Tentunya penyelenggaraan tersebut harus dilandasi dan merujuk pada ideologi bangsa.

Prinsip sila Ketuhanan yang maha esa menjadi landasan kebijakan hukum berlandaskan moralitas dan agama, sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai landasan pelaksanaan politik hukum yang menghargai dan melindungi

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia, 1989) halm. 39.

²¹ Elly Rosana, *Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, (jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016) hlm. 42.

hak asasi manusia yang nondiskriminatif, sila persatuan Indonesia sebagai landasan untuk menyatukan seluruh unsur bangsa yang ada dengan berbagai ikatan primordialnya serta multicultural yang beragam, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menjadi dasar dalam meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (demokratis) dan sila terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai landasan kehidupan bermasyarakat yang berkeadilan sosial sehingga masyarakat lemah secara sosial dan ekonomi dapat memiliki jaminan hidup yang layak, serta tidak adanya penindasan oleh mereka yang sewenang-wenang.

Ideologi pancasila tentunya harus diaplikasikan serta dikelola dengan baik untuk kemudian berjalan dengan sempurna. Driyarkara berpendapat bahwa dengan proses pelaksanaan ideologi pancasila dapat dilakukan dengan penggambaran gerak transformasi pancasila formal sebagai kategori yang tematis (secara konsep dan teori) sehingga kemudian menjadi kategori imperative (norma-norma) serta kategori operatif (praktik hidup). Dalam hal ini, akan terjadi proses transformasi yang dapat berjalan tanpa masalah apabila tidak terjadi deviasi atau penyimpangan.²²

Menurut Sastraprateja, pancasila diletakkan sebagai landasan politik yang berperan dalam mengatur dan mengarahkan segala kegiatan terkait kehidupan kenegaraan. Di dalamnya diatur tentang cara perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian nasional, kehidupan berbangsa, hubungan warga negara dengan

²² Suwarno, P.J. *Pancasila budaya bangsa indonesia* (Yogyakarta: penerbit kanisius, 1993)

negara, dan hubungan antar sesama warga negara serta usaha-usaha menciptakan kesejahteraan bersama.²³

Fakta yang terlihat di lapangan mengindikasikan bahwa Pancasila menghadapi berbagai tantangan, di mana implementasi nilai-nilainya tidak berjalan secara optimal. Penyimpangan-penyimpangan masih ada dalam masyarakat yang berlandaskan prinsip demokratis, bahkan berdampak pada kelangsungan pemerintahan. Meskipun Indonesia telah merdeka selama 76 tahun, ketidakmerataan sosial, kemiskinan, dan diskriminasi antarsuku masih merupakan kenyataan. Bahkan, ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya mengenal dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Hal ini menandakan bahwa pendidikan yang merata di antara seluruh anak bangsa masih belum tercapai, dan kondisi ini berpotensi menyebabkan timbulnya masalah sosial di masyarakat.

Pancasila memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting sebagai fondasi negara Republik Indonesia. Nilai-nilai dan fungsi yang terkandung dalam Pancasila menjadi acuan dan standar bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan pemerintahan negaranya, sesuai dengan yang telah tertuang dalam konstitusi 1945. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan haruslah selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Tidak boleh ada penyimpangan dari nilai-nilai tersebut agar negara berfungsi secara efektif dan sesuai dengan semangat yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Setidaknya pancasila memiliki 5 fungsi penting, diantaranya sebagai berikut:

²³ M. Sastrapratedja, *Pancasila sebagai visi dan refrensi kritik sosial*.(Yogyakarta,penerbit: Universitas Sanata Dharma, 2001) hlm.51.

1. Pancasila sebagai pedoman hidup, dalam hal ini pancasila memiliki peran sebagai dasar dari setiap pandangan yang ada di Indonesia. Pancasila menjadi pedoman dalam mengambil keputusannya sendiri dalam menghadapi berbagai masalah yang ada di masyarakat.
2. Pancasila sebagai jiwa bangsa, pada fungsi inti pancasila menjadi jiwa bangsa indonesia. Oleh karenanya, pancasila harus mampu dalam mewujudkan setiap lembaga baik organisasi maupun insan yang ada di Indonesia.
3. Pancasila sebagai sumber hukum, yang dimana pancasila menjadi landasan hukum dari segala hukum yang diterapkan di Indonesia. Artinya, pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak boleh adanya nilai-nilai yang bertentangan dengan pancasila.
4. Pancasila sebagai cita-cita bangsa, pancasila menjadi dasar untuk dibuat sebagai tujuan negara dan cita-cita bangsa. sebagai bangsa Indonesia, kita harus memiliki keinginan bahwa negara kita menjadi negara yang mampu dalam memegang rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu, saling toleransi dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain.
5. Dan pancasila menjadi kepribadian bangsa, yang mana pancasila dapat disebut juga dengan identitas bangsa Indonesia. Artinya, pancasila harus ada dalam diri setiap individu agar mampu memberikan kekuatan terhadap

pancasila sebagai kepribadian bangsa serta menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia²⁴

Kedudukan pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sudah dijelaskan pada alinea keempat dalam pembukaan UUD 1945, yang kemudian dituangkan dalam memorandum DPR-GR pada tanggal 9 juni 1966. Kedudukan pancasila sebagai ideologi negara diperkuat dengan dengan keluarnya ketetapan MPR No.XVIII tahun 1998 tentang penegasan pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia. Yakni pancasila yang diterapkan sebagai dasar negara memberikan artian bahwa negara Indonesia adalah negara pancasila. Oleh karena itu, pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dengan mudah.²⁵

2.2.4 Globalisasi

Kita dapat melihat perkembangan dunia modern seperti saat ini melalui interaksi yang lebih luas dan intens dalam masyarakat internasional. Interaksi ini terjadi di tempat yang berbeda Seperti ekonomi, politik, pelayanan sosial, perdagangan dan komunikasi. Abad ke 21 menjadi sangat jelas bahwa dunia semakin mengglobal, yang berarti intensitas kontak antara bangsa-bangsa di dunia dalam skala besar. Tentunya hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi di berbagai bidang seperti transportasi, internet, telekomunikasi dan dunia digital

²⁴ Supratiknya, A. (2005). *Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Nasional: Pengertian, Fungsi, dan Perannya*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.35, No.4, Hal. 439-449.

²⁵ Ratna Sari & Fatma Ulfatun Najicha, “Memahami Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Kehidupan Masyarakat”, Vol. 7, No.1 April 2022

lainnya. Nah, keadaan ini memunculkan apa yang disebut globalisasi, yang mengubah dunia dari satu kotak ke kotak lain yang lebih terbuka.

Menurut Purnomo, dalam bukunya *Globalisasi dan Politik Perkembangan Internasional*, mengatakan bahwa globalisasi merupakan titik balik dalam pembangunan manusia yang telah menciptakan masyarakat tanpa batas (borderless society), yaitu suatu sistem sosial dengan keterkaitan dan intensitas interaksi satu sama lain. Era yang dipicu oleh konsekuensi Perkembangan industri dan teknologi tentunya berdampak pada iklim perekonomian negara, termasuk Indonesia sendiri. Perubahan yang diakibatkan oleh proses globalisasi menimbulkan permasalahan yang memerlukan pemecahan tersendiri, termasuk yang berkaitan dengan hukum dan dunia usaha. Globalisasi juga dapat menyebabkan meningkatnya persaingan antar entitas bisnis, baik domestik maupun internasional.²⁶

Friedman, mendefinisikan globalisasi memiliki dimensi ideologi dan teknologi yakni kapitalisme dan pasar bebas, sedangkan dimensi teknologi berupa teknologi informasi yang telah menyatukan dunia²⁷

Pesatnya arus globalisasi, penerapan dan peneguhan nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting bagi kehidupan dan eksistensi bangsa Indonesia. Pancasila menyimpan makna yang mendalam, mampu berpengaruh besar dalam membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku warga negara. Selain itu, nilai-nilai ini membantu

²⁶ Joko Purnomo, Irza Kurunin, Raissa Ardianti, *Globalisasi dan Politik Perkembangan Internasional*, (malang: UB Press, 2017), hlm. 21

²⁷ Friedman, T. L. *The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization*, (New York: Anchor Books, 2000), hlm. 5.

mengarahkan individu untuk memilih budaya yang relevan dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa.

Pancasila sebagai ideologi memiliki tantangan yang semakin berat dalam menghadapi arus globalisasi yang cepat. Ideologi ini akan diuji oleh berbagai ideologi alternatif yang dapat dengan mudah menyebar melalui berbagai media informasi yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Fenomena sosial di lapangan, seperti semakin dominannya budaya asing di tengah masyarakat kita, mengakibatkan hilangnya nilai-nilai budaya lokal, berkurangnya semangat gotong royong, meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, dan kesulitan bagi industri lokal untuk bersaing. Dalam menghadapi tantangan ini, Pancasila perlu diterapkan dan diperkuat secara berkesinambungan agar tetap relevan dan mampu menjaga keberagaman serta identitas bangsa. Selain itu, upaya untuk mempromosikan dan melestarikan budaya lokal serta mengembangkan industri lokal menjadi hal penting guna memperkuat ketahanan ideologi Pancasila di tengah arus globalisasi yang tidak terelakkan.

Dapat disimpulkan bahwa Globalisasi telah membawa pengaruh terhadap Pancasila dalam berbagai aspek. Dampak globalisasi tersebut dapat mempengaruhi pemahaman, penerapan, dan tantangan yang dihadapi terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menekankan pentingnya pemeliharaan dan pemahaman yang mendalam terhadap Pancasila dalam menghadapi perubahan dunia yang semakin terhubung secara global.

2.2.5. Pancasila dalam Pusaran Globalisasi

Globalisasi merupakan tantangan yang sangat serius terhadap ideologi Pancasila. Hilangnya nilai-nilai pancasila dapat kita lihat dari berbagai fenomena yang kontradiktif dan tidak sesuai dengan isi pancasila itu sendiri, diantaranya dapat kita lihat sila pertama yang berkaitan dengan agama, dan fenomena kasus penodaan dan diskriminasi terhadap orang lain. Agama, perusakan tempat ibadah, dan kejahatan atas nama agama, seperti terorisme, perbudakan, dan pekerja anak. Pemerintah secara tidak adil membuat peraturan yang dapat membuat peraturan tersebut menindas orang miskin sesuai dengan sila kedua Pancasila. Munculnya diskriminasi dan perkelahian antar suku serta munculnya sekte yang berbeda adalah contoh perilaku menyimpang dari perintah ketiga. Contoh fenomena dari sila keempat adalah ketidakadilan hukum, kasus korupsi yang menjadi masalah besar bagi negara, hukum yang tidak lepas dari hukum itu sendiri, dan masih banyak lagi lainnya. Lihat Perintah Kelima melawan perilaku diskriminatif, kemiskinan, perlakuan tidak adil terhadap kelompok ras/ras karena alasan tertentu, dan pembangunan ekonomi yang tidak merata.²⁸

Menurut Nurika, seiring dengan globalisasi sebagai motor penggerak perubahan, pembahasan hubungan internasional akan mengikuti polarisasi zaman. Dimana polarisasi masyarakat modern sangat berbeda dengan masa lalu. Itu juga membuat dampak globalisasi lebih efektif. Dalam keadaan seperti ini, jati diri dan karakter bangsa Indonesia yang seharusnya melekat pada setiap jiwa raga setiap warga negara Indonesia tidak tergerus begitu saja karena tergerus oleh derasnya

²⁸ Ega Regiani dan Dinie Aggraeni Dewi, "Pudarnya Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Masyarakat di Era Globalisasi", Vol.5 No. 1 Juni 2021, hlm. 32

arus globalisasi. Untuk mencegah hal tersebut perlu ditanamkan kepribadian pada warga negara Indonesia dengan mengenalkan norma dan nilai yang terkandung dalam Pancasila.²⁹

Globalisasi merupakan suatu keniscayaan terhadap semua orang di dunia, yang dimana proses integrasi internasional/global memberikan pengaruh yang bisa merubah pandangan dunia, produk, pemikiran serta aspek-aspek kebudayaan lainnya. seiring dengan perkembangan globalisasi dunia, perlu adanya dorongan dari semua elemen pemerintahan untuk melakukan penguatan pada ideologi pancasila sebagai kiblat bangsa Indonesia.

2.2.6 Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP)

Pada tanggal 28 Februari 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 yang mengatur tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) adalah sebuah lembaga di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, serta melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Lembaga ini bertugas menyusun standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga,

²⁹ Rizki Rahmadini Nurika, *Peran Globalisasi dibalik Munculnya Tantangan baru bagi Diplomasi di Era Kontemporer*, Vol.3 No.1 (januari-juni, 2017), hlm. 127.

pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. BPIP merupakan bentuk revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP).

✓ Visi

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menjadi lembaga yang handal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam upaya pembinaan ideologi Pancasila. mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, dengan landasan nilai-nilai Gotong Royong.

✓ Misi

BPIP bertanggung jawab dalam mewujudkan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan ideologi Pancasila. Melalui upaya tersebut, nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan dalam setiap kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan praktek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.³⁰

Dengan adanya peran dan fungsi dari lembaga tersebut diharapkan dapat memperkuat ideologi Pancasila dan mengarahkan pembangunan Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, dan beradab.

³⁰ <https://bPIP.go.id/> . diakses pada tanggal 11 maret 2023.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan menggunakan jenis penelitian deskriptif yang berupa informasi langsung dari objek yang akan dikaji, serta pernyataan tertulis dari lisan pelaku yang diamati. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk menganalisis serta menjelaskan fenomena dilapangan yang dapat berupa individu atau kelompok, dinamika sosial, persepsi, sikap, pengaruh dan dapat berupa keyakinan terhadap sesuatu.

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara purposive sampling, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil pendekatan kualitatif lebih menekankan pada mana dari pada generalisasi.³¹

Menurut Denzin dan Lincoln yang dikutip oleh Albi Anggito, penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan yang melibatkan berbagai metode yang ada.³²

Pendekatan kualitatif diharapkan dapat memberikan gambaran lebih mendalam mengenai perilaku, ucapan, dan tulisan dari suatu individu/kelompok,

³¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018) hlm. 8

³² *Ibid*, hlm.7.

masyarakat, atau dari organisasi tertentu dalam keadaan konteks yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana dilakukannya penelitian untuk mendapatkan data dan fakta serta informasi untuk menunjang keperluan penelitian tertentu. Penelitian ini dilakukan pada Akademisi FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada perspektif Akademisi FISIP UIN Ar-Raniry dalam memandang Pancasila sebagai ideologi negara serta pandangan terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila seiring dengan globalisasi yang terus berjalan hingga saat ini.

Perkembangan dunia yang semakin mengglobal memberikan tantangan sendiri bagi Pancasila dalam menjaga eksistensinya, bahkan fakta sosial sudah terjadi dalam lingkungan masyarakat seperti adanya kelompok tertentu yang kontra dengan Pancasila sebagai dasar negara, terorisme, kesenjangan sosial dalam masyarakat, korupsi, nilai patriotisme anak muda yang mulai memudar dan pengaruh dunia internet yang dapat mempengaruhi anak bangsa.

3.4. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang penulis peroleh secara langsung dari kajian wawancara dan juga observasi langsung di lapangan dengan Akademisi FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis atau melalui perantara seperti mencari informasi dan data melalui buku-buku dan melalui media elektronik seperti internet dan channel berita terpercaya

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Merupakan teknik pengambilan data yang sangat efektif dalam menjawab topik penelitian. Pengambilan data menggunakan format pertanyaan yang telah disusun untuk kemudian dilakukannya proses wawancara dengan narasumber. Seiring dengan perkembangan teknologi yang memudahkan untuk mendapatkan informasi, maka wawancara juga bisa dilakukan dengan responden melalui telepon dan jenis narahubung lainnya.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi menjadi pendukung keterangan dalam penelitian serta dengan teknik dokumentasi dapat memperkuat hasil wawancara yang sebelumnya dilakukan. Dokumentasi dapat berupa karya tulis, foto-foto, peninggalan bersejarah, dokumen dan lainnya.

3.6. Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian merupakan sasaran/objek yang memberikan informasi dan juga orang yang memiliki data mengenai penelitian yang sedang dikerjakan. Dalam hal ini, kriteria yang dipertimbangkan adalah relevansi dengan topik penelitian dan disiplin ilmu politik yang didalamnya terdapat studi tentang ideologi negara, politik dan sistem pemerintahan. Kemudian juga dilihat dari keahlian dan kompetensi, kontribusi akademis, kredibilitas dan terpercaya. Yang menjadi informan ialah akademi FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh, karena memiliki kriteria yang relevan dengan penelitian ini.

No	Nama	Keterangan
1	Rizkika Lhena Darwin, S.IP., M.A.	Dosen FISIP UIN Ar-Raniry
2	Aklima, S.Fil.I.,M.A.	Dosen FISIP UIN Ar-Raniry
3	Arif Akbar, S.Fil.I, M.A.	Dosen FISIP UIN Ar-Raniry
4	Muazzinah, B.Sc.,MPA	Dosen FISIP UIN Ar-Raniry
5	Dr. S. Amirulkamar,MM., M.Si.	Dosen FISIP UIN Ar-Raniry
6	Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si.	Dosen FISIP UIN Ar-Raniry
7	Cut Zamharira, S.IP., M.AP	Dosen FISIP UIN Ar-Raniry

Tabel 1. Informan Penelitian

3.7. Teknik Analisis Data

Tahapan selanjutnya setelah data dan informasi dilapangan terkumpul yang relevan dengan topik permasalahan penelitian, maka selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil data dan informasi. Dimana dalam melakukan penelitian tersebut, penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan temuan tersebut secara sistematis, fakta dan akurat disertai dengan petikan wawancara dengan responden.

Dalam melakukan teknik analisis data, disini penulis menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) tentang langkah-langkah analisis data, yakni sebagai berikut:

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data, yaitu proses seleksi, pemfokusan hal-hal pokok, merangkum, pengabstrakan, serta transformasi data kasar yang ada dilapangan dan dilanjutkan ketika pengumpulan data.
3. Penyajian data, serangkaian penyajian data dan informasi dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Penyajian ini dilakukan untuk memudahkan peneliti atau pembaca dalam memahami hasil penelitian ini.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.³³

³³ *Ibid*, hlm. 187

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum FISIP UIN Ar-Raniry

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan merupakan fakultas yang lahir pada tahun 2014 setelah berubahnya status dari IAIN Ar-Raniry kepada UIN Ar-Raniry, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry secara resmi berdiri berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Seiring dengan tingginya kebutuhan terhadap ilmu-ilmu alam dan sosial keagamaan untuk menyikapi problematika di dalam kehidupan bermasyarakat, pada tahun 2014 UIN Ar-Raniry membuka empat fakultas baru yang salah satunya adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Dengan demikian, saat ini UIN Ar-Raniry telah memiliki Sembilan (9) fakultas dengan empat puluh tiga (43) program studi.

Kehadiran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan diharapkan menjadi solusi atas berbagai persoalan sosial politik dan pemerintahan yang terjadi di Aceh, dengan memperhatikan situasi wilayah Aceh yang baru keluar dari situasi konflik yang berkepanjangan, perubahan paradigma pemerintahan daerah. dalam model pemerintah daerah isu pembangunan sosial dan pemerintahan, pihak pengelola UIN pun tergugah untuk membuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan dengan dua program studi yaitu Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Politik. Penyelenggaraan program studi Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Politik dilaksanakan berdasarkan surat mandate Direktur

Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 384/E.E2/DT2014 tanggal 25 April 2014 dan surat kesediaan Rektor Nomor Un.07/R/PP.00.9/1656/2014 tanggal 22 April 2014.

4.1.2 Visi dan Misi FISIP UIN Ar- Raniry

Visi

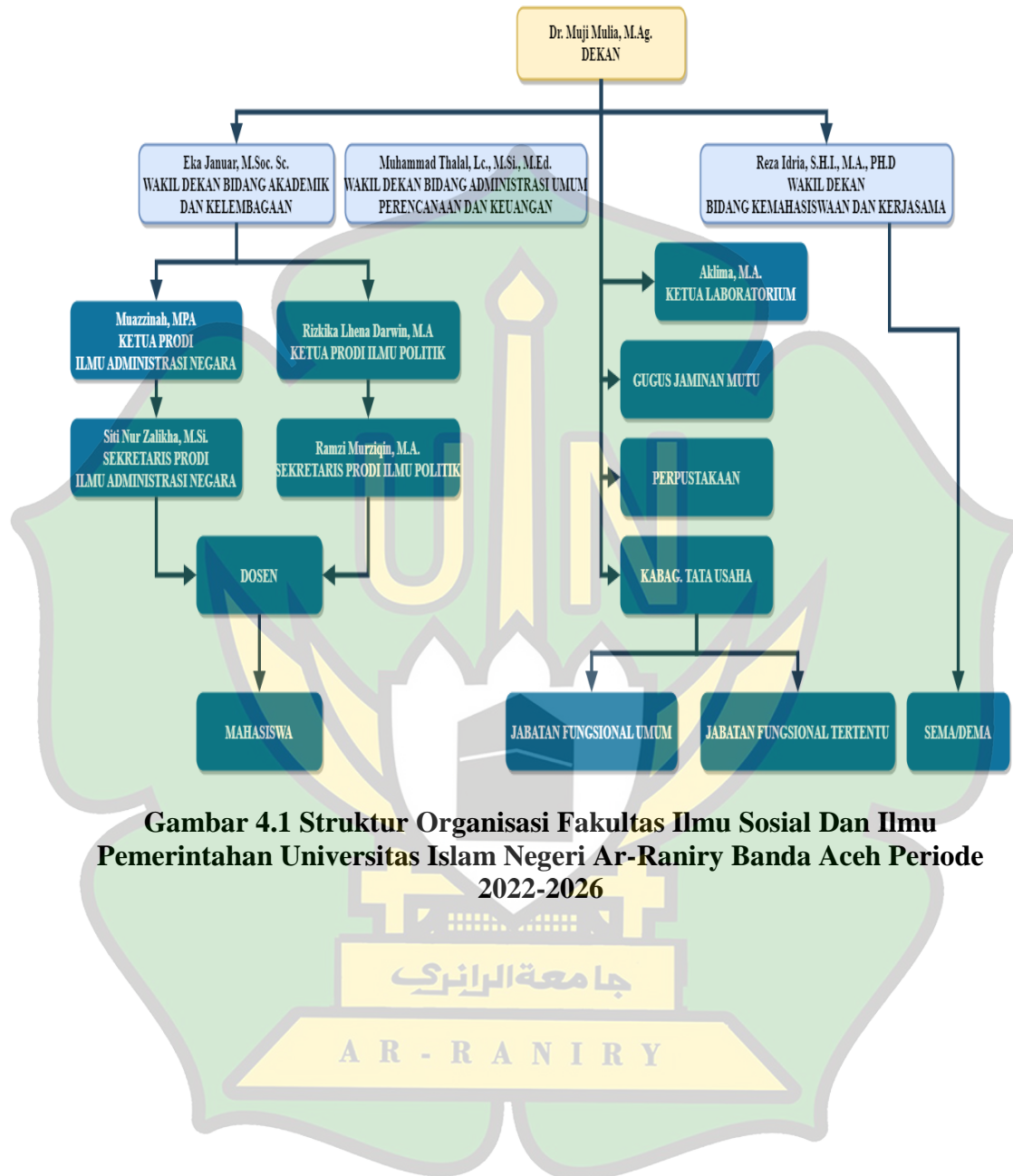
- Menjadi fakultas riset yang unggul dan berjiwa entrepreneur di bidang sosial dan pemerintahan serta mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa yang berbasis islam dengan memperhatikan kearifan lokal melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2025

Misi

- Melaksanakan pendidikan yang berlandaskan agama islam, sehingga pemikiran, wawasan dan keterampilan mahasiswa bidang ilmu sosial dan pemerintahan
- Melakukan penelitian dan kajian ilmu administrasi negara dan ilmu politik untuk mendukung terwujudnya good governance.
- Pengabdian masyarakat dan meningkatkan jaringan kelembagaan yang berbasis teknologi, komunikasi dan informasi.³⁴

³⁴ <http://fisip.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/sejarah>. Diakses pada tanggal 11 Maret 2023.

4.1.3 Struktur Organisasi FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022-2026

4.2. Perspektif Akademisi FISIP UIN Ar-Raniry Dalam Memandang Pancasila Sebagai Ideologi Negara.

Kandungan nilai yang terkandung dalam Pancasila memberikan konsep yang ideal dan meyakinkan tentang kebenaran dan peranannya dalam mengayomi dan menyatukan masyarakat Indonesia. salah satu fungsi pentingnya adalah membentuk identitas kelompok yang beragam dan multikultural. Ideologi cenderung memisahkan antara kita (kelompok sendiri) dan mereka (kelompok lain), namun tujuan utamanya adalah untuk mempersatukan. Dalam perbandingan dengan agama, agama juga berperan dalam mempersatukan manusia dari berbagai latar belakang dengan berbagai pandangan hidup yang berbeda, bahkan mempersatukan manusia dari berbagai negara yang memiliki keyakinan agama yang sama. Di sisi lain, ideologi dapat menyatukan orang-orang dari berbagai agama dan berfungsi untuk mengatasi konflik atau ketegangan sosial.

Sebagai falsafah Negara, pancasila memiliki kandungan nilai-nilai yang harus diamalkan dan diwujudkan dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Pancasila tidak hadir dari situasi yang Vakum-totak break, akan tetapi dirumuskan atas dasar idealisme yang kuat, renungan sejarah yang mendalam, dan berbagai pengorbanan yang dilakukan untuk berdirinya sebuah pandangan hidup yang dapat menyatukan bangsa Indonesia yang majemuk.

“saya lihat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara itu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat indonesia yang bahwa secara demografis kita itu multikulturalisme, jadi banyak menjadi satu sehingga hal ini kemudian diakselerasikan untuk tidak terjadi konflik identitas, konflik antar umat beragama, antar suku, dan lain sebagainya. Sehingga, maka kemudian di sila pertama dijelaskan bahwa ketuhanan yang maha esa yang artinya kita punya tuhan dan kepercayaan masing dan saling

menghargai dan dari sila pertama juga terkandung value bahwa toleransi menjadi sesuatu hal yang kemudian harus kita jalankan warga negara indonesia.”³⁵

Pancasila sebagai ideologi negara memberikan pengertian bahwa negara indonesia adalah negara Pancasila yang sudah final dan mengikat. Hal tersebut mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya serta membela dan melaksanakannya dalam keseluruhan perundang-undangan yang telah menjadi kesepakatan bangsa indonesia, hal ini bisa kita lihat dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang mewajibkan seluruh rakyat indonesia untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari serta menghindari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar tersebut. Hasil wawancara dengan Ibu Rizkika Lhena Darwin menjelaskan bahwa :

“Pancasila adalah sebuah ideologi negara yang bersifat final dan mengikat. Maksud final adalah ia menjadi kesepakatan bangsa Indonesia, dan mengikat kita semua untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara.”³⁶

Pandangan selanjutnya dari Ibu Cut Zamharira, melihat pancasila sudah mewakili masyarakat kita yang majemuk, Namun juga ada nilai-nilai yang terkandung pancasila tidak berjalan sesuai dengan amanat dari pancasila.

“kalau kita lihat pancasila dari sila satu sampai dengan sila lima secara keseluruhan sudah mewakili masyarakat kita yang majemuk kemudian juga tidak bisa dipungkiri memang ada beberapa sila-sila yang tidak berjalan dengan amanat dari Pancasila misalnya keadilan sosial yang tidak merata seperti akses pendidikan di daerah-daerah terpencil yang susah dijangkau oleh anak negeri. Kemudian kalau kita lihat dari sila pertama tentang ketuhanan yang maha esa, menurut saya segala

³⁵ Wawancara dengan Dosen FISIP UIN Ar-Raniry. Ibu Aklima pada tanggal : 03 April 2023

³⁶ Wawancara dengan Dosen FISIP UIN Ar-Raniry, Ibu Rizkika Lhena Darwin dan tanggal : 30 maret 2023

sesuatunya itu memang ada aturan misalnya agama yang diakui di Indonesia itu ada tujuh agama, nah selain dari itu memang tidak ada legalitas dari konstitusi kita untuk diakui selain ketujuh agama tersebut saya pikir Pancasila itu masih ideal diterapkan pada masyarakat kita yang multikulturalisme dan keberagaman Indonesia itu disatukan oleh Pancasila, hanya saja perlu adanya sistem penerapan nilai-nilai Pancasila yang harus ditingkatkan lagi.³⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat kita pahami bahwa Pancasila sebagai ideologi negara sudah sangat mewakili karakter dan perilaku masyarakat kita yang majemuk serta kandungan nilai yang ada di dalamnya memberikan makna dan tujuan yang jelas bagi masyarakat Indonesia.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila belum seluruhnya berjalan dengan baik di masyarakat baik dari segi pendidikan, hukum, sosial, dan juga fenomena-fenomena intoleran yang terjadi di masyarakat.

4.2.1. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

Negara yang majemuk seperti Indonesia, multikulturalisme merupakan realitas yang tak terhindarkan. Bangsa Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan bahasa, suku, bangsa, dan agama. Jika multikulturalisme ini dapat kita kelola dengan baik, maka akan menjadi berkah dan kekuatan bagi bangsa ini. Namun, jika kita tidak mampu mengelolanya dengan baik, dapat menjadi musibah yang mengancam persatuan dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, desain pendirian negara dan negara kesatuan Republik Indonesia bertujuan untuk menciptakan negara yang bersatu, berdaulat adil, dan makmur. Tujuan ini hanya dapat dicapai melalui negara kebangsaan yang demokratis, berlandaskan keadilan

³⁷ Wawancara dengan Dosen FISIP UIN Ar-Raniry, Ibu Cut Zamharira pada tanggal 5 April 2023

sosial dan perikemanusiaan. Para pendiri bangsa Indonesia meyakini bahwa melalui negara yang demokratis, dengan menghormati hak asasi manusia, dan didasarkan pada kesadaran akan Tuhan Yang Maha Esa, keberagaman dan pluralitas bangsa ini akan memberikan makna positif. Sebagaimana cuplikan pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, beliau menekankan bahwa “negara Indonesia bukanlah untuk kepentingan individu atau golongan tertentu. Negara ini dirancang untuk menghormati semua orang dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua warganya. Semua orang memiliki peran dan tanggung jawab dalam membangun negara ini, tanpa memandang status sosial atau kekayaan mereka.”³⁸ Prinsip semua buat semua, satu buat semua, semua buat semua menggarisbawahi pentingnya persatuan, kesetaraan, dan keadilan dalam negara kita

Menurut Bapak Mirza Fanzikri, melihat bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dari sejak Indonesia merdeka sampai dengan saat ini dapat dilihat dari dua perspektif yakni secara konsep, regulasi, aktualisasi dan secara kebudayaan.

“saya melihatnya dalam dua perspektif, pertama secara regulasi Pancasila sudah berjalan artinya segala undang-undang yang sudah disusun oleh pemerintahan baik undang-undang, perpres, permen, sampai dengan peraturan di pemerintahan kabupaten/kota dan pemerintahan desa itu memang harus mengacu pada Pancasila, artinya tidak boleh bertentangan dengan amanat dari Pancasila itu sendiri. Namun, dalam perspektif kedua, yaitu kebudayaan memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa masyarakat yang bisa dikatakan kurang memahami ideologi Pancasila dan memang belum sepenuhnya penerapan di masyarakat yang berjalan dengan maksimal. Jadi secara konsep, teoritis, regulasi itu sudah berjalan namun sebagian besarnya di masyarakat dalam perilakunya secara kebudayaan masih perlu peningkatan-

³⁸ Abd.Mu'id Aris Shofa dkk., “Praktik Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Generasi Muda” Vol.2, No.1, April 2019, Hal 1-5.

peningkatan agar Pancasila ini menjadi dasar dalam bernegara dan bermasyarakat indonesia.”³⁹

Menilik pada amanat konstitusi kita bahwa pancasila adalah kesepakatan bersama, maka nilai-nilai tersebut mengharuskan seluruh masyarakat Indonesia untuk berupaya secara sungguh-sungguh dalam mewujudkannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, serta menghindari pemikiran dan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar tersebut. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka menuntut adanya keterbukaan dan fleksibilitas yang harus diterima dan dilaksanakan oleh semua kelompok yang ada di Indonesia.

Sekarang mari kita lihat sejauh mana pancasila sudah berjalan sejak dari pemerintahan orde lama sampai dengan era yang sedang berlangsung saat ini serta. bagaimana nilai kandungan itu menjadi pedoman masyarakat dalam lingkungan sehari-harinya. Dalam wawancara dengan Ibu Aklima, ia melihat bahwa pancasila seharusnya sudah berjalan dengan baik karena kita sudah merdeka berapa tahun lamanya dan sudah paham bahwa pancasila menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Namun ternyata pemahaman terhadap pancasila itu belum tuntas sehingga berakibat pada tingkah laku sosialnya.

“seharusnya sudah berjalan dengan baik karena kita sudah merdeka berapa tahun lamanya merdeka dan sudah paham bahwa Pancasila ini menjadi pedoman hidup karena kita sebagai warga negara kita tidak hanya duduk diam tetapi juga harus tau apa fungsi kita sebagai warga negara, jadi dengan kita sadar dan paham fungsi kita sebagai warga negara maka saya kira nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila dengan sendirinya juga akan berjalan dengan baik.

Tetapi sayangnya hari ini itu bahwa pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini kemudian tidak

³⁹ Wawancara dengan Dosen FISIP UIN Ar-Raniry, Bapak Mirza Fanzikri pada hari dan tanggal : 4 April 2023.

tidak tuntas maka kemudian berakibat pada tingkah laku sosialnya yang bisa mempengaruhi kondisi indonesia hari ini. misalnya fenomena sosial yang bisa kita liha seperti jihad,bom bunuh diri, konflik antar suku dan banyak lainnya. Konotasinya kemudian negatif tetapi dimakanai secara positif atau sebaliknya jihadnya yang positif tapi konotasinya dimaknai secara negatif. Kenapa itu bisa terjadi karena mereka tidak selesai padahal sudah dijelaskan di sila pertama bahwa toleransi menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat indonesia yang multikulturalisme.”⁴⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Said Amirul Kamar :

“sebenarnya kandungan nilai yang ada pada Pancasila sudah menjawab keberagaman yang ada di indonesia dan terlaksana dengan baik, namun setelah berapa tahun lamanya kita merdeka, masih banyak penyelewengan dari ideologi negara ini, itu bisa dilihat dari situasi yang ada di indonesia hingga saat ini yang dimana sebagian daerah masih adanya pemberontakan yang dilakukan untuk memisahkan diri dari indonesia . itu menjadi contoh kasus bahwa Pancasila belum maksimal di tengah-tengah masyarakat kita”⁴¹

⁴⁰ Wawancara dengan Dosen FISIP UIN Ar-Raniry, Ibu Aklima pada tanggal 3 April 2023

⁴¹ Wawancara dengan Dosen FISIP UIN Ar-Raniry, Bapak Said Amirul Kamar pada tanggal 1 April 2023

4.3. Perspektif Akademisi FISIP UIN Ar-Raniry Memandang Tantangan Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Seiring Dengan Arus Globalisasi.

Fenomena globalisasi yang meliputi berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat dalam berbagai bidang seperti sosial budaya, ekonomi, politik, dan pemerintahan. dampak yang terus menerus dari globalisasi telah menciptakan keterkaitan yang kuat dalam kehidupan sosial di antara negara-negara. Mulai dari individu, kelompok, hingga negara-negara, semuanya saling terhubung dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Tantangan yang dihadapi Pancasila di era globalisasi adalah pengaruh dari arus globalisasi yang merata dan signifikan pada semua aspek kehidupan dan masyarakat di Indonesia. Globalisasi tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga berdampak pada seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia. Melalui pengaruh dari dunia internasional, globalisasi dapat mengubah tatanan kehidupan di berbagai negara. Salah satu efek negatif dari globalisasi adalah potensi melunturnya dan tergesernya nilai-nilai tradisional Indonesia serta berkurangnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia. wawancara dengan Ibu Muazzinah, menjelaskan bahwa:

“saya melihat dengan perkembangan globalisasi di era serba digital, tantangan terhadap Pancasila akan sangat berpengaruh kalau tidak adanya pengawasan lebih dari pemerintah sehingga tidak akan adanya paham-paham baru yang radikal sehingga merusak pemahaman nilai-nilai Pancasila. Selain itu juga masuknya ideologi asing yang masuk ke Indonesia. Kemudian banyaknya kabar tidak benar / hoaks yang akan merusak nilai pancasila tersebut.”⁴²

⁴² Wawancara dengan Dosen FISIP UIN Ar-Raniry, Ibu Muazzinah pada tanggal 3 April 2023

Dewasa ini, kita dapat melihat beberapa fenomena yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan peran pentingnya dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, banyak anak muda yang lebih tertarik pada tarian modern daripada tarian tradisional, preferensi terhadap produk impor daripada produk lokal, serta adopsi gaya dan busana yang mengikuti tren luar negeri. Selain itu, budaya Barat juga memiliki pengaruh yang cukup kuat di berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Semua hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip Pancasila yang seharusnya menjadi panduan bagi setiap individu.

Sadar atau tidak, Masyarakat di era globalisasi dihadapkan pada tantangan dalam menghadapi munculnya ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemampuan untuk menyaring dan menangkal hal-hal tersebut dipengaruhi oleh pemahaman dan kesadaran individu terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila.

Tantangan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung pada pancasila yakni:

1. Tantangan di sila kesatu, dapat dilihat dari Pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai dasar Pancasila dapat diamati dan dipelajari melalui fenomena "agama KTP" yang muncul di kalangan sebagian masyarakat. Masalah aktualisasi nilai-nilai spiritual dalam hal ini berkaitan dengan pandangan beberapa individu dalam masyarakat yang mencari alternatif ideologi agama untuk negara. Tantangan lainnya seperti mulculnya paham-paham komunisme/sosialisme, sekularisme dan berbagai paham transnasional lainnya.

2. Tantangan di sila kedua, perilaku sosial anak bangsa yang sangat bebas dan terbuka sangat penting untuk diperhatikan. Kebebasan yang diberikan oleh kemajuan teknologi seringkali diartikan sebagai kebebasan tanpa batas, yang sayangnya berkontribusi pada meningkatnya perilaku perundungan, persekusi, dan penghujatan terhadap orang lain. Tantangan yang muncul juga terkait dengan sila kedua Pancasila, yaitu dinamika terorisme yang melibatkan sebagian anggota masyarakat yang terperangkap dalam pola pikir dan tindakan radikalisme. Kejadian pada bom bunuh diri di Bali menjadi bukti dari lemahnya implementasi nilai pancasila dari kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Tantangan pada sila ketiga, Dapat diperhatikan melalui dominasi yang muncul dari suatu komunitas dan sikap pesimis. Sementara itu, dominasi sektarian/komunitas adalah ideologi yang berasal dari pemikiran kelompok tertentu yang dikategorikan sebagai mayoritas komunitas dengan sifat eksklusif.
4. Tantangan sila keempat, Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia adalah praktik politik identitas, politik irasional, dan politik uang, yang mengancam nilai-nilai penghormatan terhadap demokrasi dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengganggu persatuan dan kesatuan negara, serta menghambat upaya mencapai kesejahteraan bersama.
5. Terakhir Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai dalam sila kelima adalah adanya

munculnya paham-paham seperti kapitalisme, hedonisme, dan individualisme. Padahal, sila kelima bertujuan untuk mencapai keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya, sebagian masyarakat terpengaruh oleh gaya hidup yang berorientasi pada kekayaan dan kesenangan pribadi, yang pada akhirnya mengarah pada timbulnya masalah korupsi. Kejahatan korupsi ini, pada gilirannya, telah mengakibatkan kerusakan ekonomi bagi bangsa. Dan juga budaya korupsi yang terus berlangsung hingga saat ini yang menyebabkan masyarakat menderita karena kehilangan lahan, pekerjaan, dan berbagai jenis kepemilikan lainnya.⁴³

Dalam hal ini, Ibu Rizkika Lhena Darwin juga menegaskan bahwa:

“Tantangan yang dihadapi Pancasila bukan saja menghadapi arus globalisasi, namun juga arus kelokalan seperti isu identitas, religion dan sebagainya. Beberapa isu tersebut membenturkan diri dengan Pancasila sehingga mengakibatkan aktualisasi Pancasila semakin hari semakin minim.”⁴⁴

Menanggapi tantangan penerapan nilai-nilai pancasila di era globalisasi,

Bapak Mirza Fanzikri menegaskan bahwa:

“tantangannya ada pada masyarakat ya secara hukum, secara kebijakan sudah bagus namun dalam perilaku-perilaku pemerintah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah juga akan memepengaruhi tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam berprilaku, contohnya ada ideologi transnasional yang akan mengganggu penerapan Pancasila bahkan perilaku pada pemerintahan seperti budaya korupsi, budaya kriminalisasi, budaya intoleran dan budaya yang mementingkan

⁴³ Aini Shifana Savitri & Dinie Anggraeni Dewi, “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan di Era Globalisas”, Vol.5, No.2, September 2021, Hal 170-171

⁴⁴ Wawancara dengan Dosen FISIP UIN Ar-Raniry, Ibu Rizkika Lhena Darwin. Pada tanggal: 30 maret 2023.

kelompok-kelompok tertentu itu adalah perilaku yang jauh dari nilai-nilai Pancasila.

Jadi tantangannya itu ada pada bangsa kita sendiri dan tidak bisa menyalahkan bangsa lain dan perkembangan global yang semakin pesat. Saya melihat ini lebih kepada tantangan internal, saya yakin faktor eksternal itu ada tapi kalau kita sudah punya landasan yang kuat, moralitas yang kokoh, sikap dan perilaku yang tangguh, maka penerpan Pancasila itu tidak akan tergoyah. Pancasila ini sangat relevan baik dengan agama maupun budaya masyarakat indonesia.”⁴⁵

Karyono Wibowo (Pengamat Politik Indonesia Public Institute), dalam wawancaranya dengan KOMPAS TV melihat bahwa perkembangan era digital menjadi tantangan bagi penanaman nilai-nilai pancasila.

“saya kira yang paling penting itu adalah bagaimana menyusun formula dan metode untuk penanaman ideologi-ideologi pancasila di semua segmen masyarakat, terutama bagi para kaum generasi millennial. Tentu saja metodenya harus menyesuaikan dengan perkembangan dunia digital saat ini, dimana mereka (millennial) itu kurang lebih dalam satu hari menghabiskan minimal 7 jam menghabiskan waktunya dengan gadget. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai pancasila juga harus menggunakan teknologi informasi yang berbasis digital sebagai tools untuk menanamkan nilai-nilai pancasila kepada generasi millennial dengan perkembangan yang ada”.⁴⁶

Agar eksistensi pancasila selalu terjaga dan menjadi pedoman hidup masyarakat indonesia, tentunya harus dilakukannya langkah-langkah untuk

⁴⁵ Wawancara dengan Dosen FISIP UIN Ar-Raniry, Bapak Mirza Fanzikri pada tanggal :4 April 2023.

⁴⁶ Karyono Wibowo dalam wawancara dengan KOMPAS TV, pada tanggal 31 juli 2020. Diakses pada tanggal 2 juni 2023.

mengatisipasi pengaruh buruk dari globalisasi yang semakin cepat merebak melalui dunia digital.

Setidaknya langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah dampak buruk globalisasi terhadap kandungan nilai-nilai yang ada pada Pancasila yakni:

1. Membudayakan dan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila secara optimal dalam kehidupan sehari-hari.
2. Meningkatkan semangat nasionalisme yang kuat, seperti semangat untuk mendukung dan mencintai produk-produk lokal.
3. Menyebarkan dan menerapkan prinsip-prinsip agama dengan sepenuh hati.
4. Mengaktualisasikan dominasi hukum, mengimplementasikan dan menjalankan hukum sepenuhnya dengan benar dan adil.
5. Mengadopsi sikap selektif terhadap dampak globalisasi pada politik, ideologi, ekonomi, dan sosial budaya suatu negara.⁴⁷

Oleh karena demikian, Eksistensi nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting tertanam dengan baik di masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi di era digital saat sekarang ini. yakni dengan melakukan berbagai langkah-langkah besar agar revitalisasi serta aktualisasi di masyarakat semakin optimal dalam membendung pengaruh globalisasi yang semakin mudah masuk dalam ranah nasional. Dalam wawancara dengan Bapak Arif Akbar, melihat bahwa masyarakat mampu menghadapi globalisasi ini dengan adanya pendidikan dan aktualisasi nilai Pancasila secara optimal.

⁴⁷ H.Firman Yudhanegara, *Pancasila Sebagai Filter Pengaruh Globalisasi Terhadap Nilai-Nilai Nasionalisme*, Vol.8, No.2, Juli-Desember 2015. Hal.169.

*“butuh perhatian dari kita semua agar tantangan-tantangan itu bisa kita lalui, kita paham bahwa arus globalisasi itu hal yang tidak bisa kita bendung dan itu secara tidak langsung akan mengurus daripada nilai-nilai Pancasila itu tadi. Tapi saya yakin masyarakat kita itu bisa mengcover perkembangan arus globalisasi itu tadi, yang sangat penting dari sini adalah adanya pendidikan bagi masyarakat. jadi dengan adanya pendidikan Pancasila yang baik saya yakin masyarakat mampu dalam melawan tantangan arus globalisasi ini”.*⁴⁸

Selanjutnya, Ibu Aklima menegaskan bahwa perlunya peningkatan di pendidikan agar masyarakat kita paham dengan nilai pancasila sebagai pedoman kehidupan dalam kehidupan sehari-harinya.

*“peningkatan di pendidikan, jadi di setiap kurikulum itu harus digagaskan bahwa Pancasila itu mejadi studi khusus sehingga dari kecil mereka sudah paham bahwa ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai yang perlu diterapkan. jadi tidak hanya sebagai pemahaman konsep tetapi sudah menjadi aktualisasi. Kalau hanya sekedar pemahaman konsep maka tidak akan bisa diukur tetapi kalau sudah menjadi aktualisasi maka baru bisa diukur”.*⁴⁹

Dari paparan perspektif Akademisi FISIP UIN Ar-Raniry diatas, bisa kita simpulkan bahwa perkembangan globalisasi nyata menjadi tantangan bagi Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia. Nilai-nilai individualisme, materialisme, dan konsumerisme yang didorong oleh globalisasi dapat berpotensi mengikis nilai-nilai kolektivisme, gotong royong, dan ketuhanan yang mendasari Pancasila.

Sehingga perlu adanya terobosan baru dalam menjaga keeksistensian pancasila di tengah-tengah arus globalisasi. Berdasarkan hasil wawancara dan

⁴⁸ Wawancara dengan Dosen FISIP UIN Ar-Raniry, Bapak Arif Akbar pada tanggal: 31 Maret 2023.

⁴⁹ Wawancara dengan Dosen FISIP UIN Ar-Raniry, Ibu Aklima pada tanggal : 3 April 2023.

analisis diatas, penulis melihat ada beberapa langkah yang harus dituntaskan yakni,:

- Peningkatan Pendidikan dan Pemahaman Pancasila Melalui sistem pendidikan yang kuat, ini penting untuk memastikan bahwa generasi muda memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila dengan baik. Ini dapat dilakukan dengan memperkuat kurikulum pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, serta dengan mengadakan pelatihan dan seminar bagi guru dan dosen untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang Pancasila.
- Penegakan Hukum, Meningkatkan penegakan hukum untuk melindungi nilai-nilai Pancasila dari ancaman dan penyelewengan. Hal ini dapat mencakup penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi, intoleransi, radikalisme, dan pelanggaran hak asasi manusia.
- Pengawasan dan Transparansi, Dengan mengedepankan tingkat transparansi yang tinggi, memastikan adanya pengawasan yang efektif, dan menegakkan pertanggungjawaban yang jelas, nilai-nilai Pancasila dapat berfungsi sebagai pedoman bagi tata kelola negara yang baik
Dengan demikian, diharapkan pancasila tetap mampu memberikan eksistensinya dan menjadi pijakan yang kuat untuk masyarakat dalam membendung tantangan arus globalisasi yang terus berlangsung hingga saat ini.

4.3.1 Relevansi Pancasila di Masa Depan

Perkembangan zaman dan tantangan yang sudah sangat jelas terlihat di masyarakat kita di era globalisasi yaitu perkembangan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 yang dapat mengganggu eksistensi Pancasila sebagai identitas nasional. siap atau tidak siap Indonesia harus berada dalam arus globalisasi yang semakin kuat dengan perkembangan teknologi yang pesat di era industri 4.0 dan Society 5.0 yang menghancurkan masyarakat Indonesia dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada.

Penting bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan jati diri dan tidak kehilangan identitasnya. Meskipun pertumbuhan individu yang didasarkan pada nilai-nilai asing dapat membawa kemajuan, namun kemajuan tersebut juga dapat menjadi ancaman, menjadikan orang-orang merasa asing dengan budaya dan identitas mereka sendiri. Fenomena ini sudah mulai terlihat dengan mengabaikan banyaknya nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks perkembangan teknologi saat ini, di mana setiap individu harus memiliki keterampilan yang mumpuni untuk bersaing dengan dunia luar, rakyat Indonesia perlu menciptakan suatu rencana tindakan yang melibatkan implementasi Pancasila dalam berbagai bidang.⁵⁰

Pentingnya eksistensi Pancasila seiring dengan meningkatnya arus globalisasi yang semakin kuat di masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, terjadi penurunan semangat nasionalisme dan patriotisme. Hal ini terlihat dari prevalensi pandangan generasi muda yang menganggap budaya Barat lebih modern daripada budaya lokal. Fenomena ini bisa dilihat dari sikap, gaya

⁵⁰ Handy Yoga Raharja, "Relevansi Pancasila Era Industry 4.0 dan Society 5.0", Vol.2, No.1, Maret 2019, Hal.18.

berpakaian, bahasa yang digunakan, dan pola hidup generasi muda yang lebih mengadopsi budaya asing daripada budaya mereka sendiri. Tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga merambah ke wilayah pedesaan.

Hasil wawancara dengan Ibu Aklima, melihat bahwa kandungan nilai dalam Pancasila merupakan sesuatu yang juga dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dengan cara mematangkan kesiapan sumber daya manusia (SDM).

“Relevan, dengan artian bahwa Pancasila ini bukan sebuah pedoman yang kemudian dia tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan tetapi yang perlu dipertanyakan hari ini adalah kesiapan dari sumber daya manusianya (SDM) untuk menyikapi keberadaan Pancasila. Misalkan perkembangan teknologi hari ini juga tidak bertentangan dengan Pancasila selama dia berjalan pada ruang yang sebenarnya. Jadi catatannya itu ada di sumber daya manusia (SDM), pemahaman, konsep, kemudian aktualisasi dengan artian aktualisasinya itu tidak hanya pada sila-sila tetapi ada value yang kemudian bisa di pahami dari setiap sila-sila tersebut yang di amatkan sesuai undang-undang 1945.”⁵¹

Wawancara lainnya yakni dengan Ibu Rizkika Lhena Darwin, mengungkapkan bahwa Pancasila menjadi filter dalam menyaring isu-isu yang dapat menyebabkan perpecahan.

“Saya pikir Pancasila ini masih sangat relevan. Ia menjadi filter diri bagi bangsa Indonesia untuk menyaring isu-isu yang akan mengakibatkan pada perpecahan. Persoalannya bukan pada seberapa relevan Pancasila, namun seberapa mampu kita menyederhanakan konsep Pancasila dipahami secara utuh oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga dapat dengan mudah diaktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Dimana Pancasila merupakan term “aktif” bukan “pasif”.”⁵²

⁵¹ Wawancara dengan Dosen FISIP UIN Ar-Raniry, Ibu Aklima pada tanggal : 3 April 2023

⁵² Wawancara dengan Dosen FISIP UIN Ar-Raniry, Ibu Rizkika Lhena Darwin pada tanggal : 30 Maret 2023.

Pendidikan memegang peran sentral dalam membentuk karakter individu serta menjadi faktor kunci dalam menjaga kelangsungan hidup negara dan bangsa. dengan menekankan pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila, diharapkan dapat menjadi solusi untuk membatasi dan mengurangi dampak negatif dari fenomena globalisasi. jadi, diharapkan ke depannya nilai-nilai dan identitas bangsa dapat terakar dalam pikiran dan perilaku manusia, yang menunjukkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, serta menjadi manusia yang adil dan beradab, mendukung persatuan bangsa Indonesia, menganut prinsip kerakyatan yang menjunjung tinggi kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok, serta mendukung usaha untuk mencapai keadilan sosial di dalam masyarakat.⁵³

Dengan melakukan berbagai langkah-langkah seperti dalam uraian diatas, maka pancasila akan terus memberikan pengaruhnya kepada masyarakat kita sekalipun itu dalam perkembangan zaman yang semakin pesat. Tinggal sekarang bagaimana nilai-nilai tersebut teraktualisasikan dengan baik di masyarakat. maka upaya untuk membendung pengaruh globalisasi mampu tersaring dengan baik di masyarakat. Dalam wawancara tentang relevansi pancasila di masa depan, Bapak Said Amirul Kamar, menyampaikan bahwa :

“Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila Tetap relevan dengan kondisi kekinian (saat ini) Dalam artian bahwa tatanan negara berasaskan Pancasila dan dijadikan sebagai ideologi negara Indonesia. Sehingga dalam setiap pembuatan peraturan- perundang-undangan negara mesti berpedoman pada nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya, dengan penegasan Peraturan dan kebijakan pemerintah tidak diperbolehkan bertentangan dengan Pancasila. Relevansi Pancasila

⁵³ Ibid.hal 176.

sebagai ideologi negara sekaligus sebagai sumber hukum di atas sumber hukum negara, dimana Pancasila sebagai ideologi negara sangat luas penerapannya bagi individu, pejabat negara dan pejabat pemerintahan untuk bersikap sesuai dengan nilai dan asas Pancasila, namun bila dicermati ditemui sebagian aparat pemerintah mulai meninggalkan nilai-nilai Pancasila.

Implementasi pada nilai-nilai Pancasila di era globalisasi ini bisa diterapkan mulai dari menumbuhkan sifat nasionalisme. Sifat nasionalisme ini bisa digali pada saat ada momentum penting negara, seperti peringatan sumpah pemuda, hari kemerdekaan, hari pahlawan, dan hari besar nasional lainnya.”⁵⁴

Dari uraian diatas, bisa kita simpulkan bahwa arus globalisasi nyata mempengaruhi nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila bahkan bisa menyebabkan eksistensi pancasila menjadi pudar. Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila sudah sangat merepresentasikan masyarakat indonesia yang multikulturalisme, tinggal bagaimana melakukan upaya-upaya yang dapat menguatkan eksistensi nilai tersebut di tengah masyarakat. Salah satunya dengan peningkatan pendidikan dengan sistem yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan penguatan pengawasan hukum terhadap pancasila dalam membendung tantangan-tantangan baik dari dalam maupun dari luar.

⁵⁴ Wawancara dengan Dosen FISIP UIN Ar-Raniry, Bapak Said Amirul Kamar pada tanggal :3 April 2023.

4.3.2 Akademisi sebagai Alat Transformasi Pendidikan dalam Menjaga Eksistensi Pancasila.

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menghadapi perubahan era global saat ini. Pendidikan memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana menghadapi perubahan dan membantu dalam mewujudkan pembangunan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam proses perubahan tersebut. Dengan demikian, pendidikan dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk transformasi.

Penting untuk memperhatikan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain agar daerah lain dapat berkembang dengan baik. Dengan mengutamakan upaya peningkatan pendidikan, maka akan berdampak positif bagi perkembangan sektor lainnya. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi fokus perhatian untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kemajuan semua sektor dan pembangunan pada umumnya.⁵⁵

Akademisi merupakan komponen garda terdepan dalam mempromosikan pemahaman yang mendalam, melakukan penelitian dan pengembangan, memberikan masukan kritis, melindungi nilai-nilai Pancasila, serta menjadi advokat yang gigih. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat luas diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi eksistensi dan pemeliharaan Pancasila sebagai landasan negara. Dalam wawancara dengan Ibu Cut Zamharira, menyatakan bahwa :

⁵⁵ Anita Rinawati, “Transformasi Pendidikan untuk Menghadapi Globalisasi”, Vol.3, No.1, juni 2015, Hal.95.

“saya kira akademisi memiliki peran yang penting dalam memberikan ilmu pengetahuan tentang kepancasilaan, itu bisa dilakukan dengan memberikan pendidikan pemahaman tentang Pancasila baik di kampus ataupun di luar kampus serta melakukan berbagai kajian tentang pancasila hingga mendapatkan solusi terhadap masalah yang sedang berlangsung dan terakhir bisa dilakukan dengan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan contoh dan perilaku yang baik dimasyarakat serta dengan berbagai pendekatan tertentu untuk melakukan transformasi pendidikan tersebut”⁵⁶

Peran akademisi sebagai alat transformasi pendidikan sangat penting dalam menjaga keutuhan Pancasila di era globalisasi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memainkan peran sentral dalam membangun dan memelihara identitas bangsa serta memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah tantangan globalisasi. Melalui peran aktif akademisi dalam transformasi pendidikan, diharapkan Pancasila dapat terus menjadi pijakan moral dan ideologis yang kuat bagi masyarakat Indonesia di era globalisasi.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam pendidikan, menjaga kesadaran akan nilainya, dan menghasilkan pemikiran dan solusi inovatif, akademisi dapat memberikan kontribusi penting dalam menjaga keutuhan Pancasila sebagai identitas bangsa dan fondasi persatuan di tengah dinamika global.

Peran kunci yang dapat dimainkan oleh akademisi ialah dalam menjaga keutuhan pancasila di tengah arus globalisasi ialah:

1. Penelitian dan pengembangan, Akademisi dapat melakukan penelitian dan pengembangan yang berfokus pada aspek-aspek Pancasila, termasuk

⁵⁶ Wawancara dengan Dosen FISIP UIN Ar-Raniry, Ibu Cut Zamharira pada tanggal :5 April 2023.

sejarah, filsafat, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Melalui penelitian yang mendalam, akademisi dapat memperkuat pemahaman tentang Pancasila dan menghasilkan pemikiran baru yang relevan dengan tantangan global saat ini.

2. Pendidikan dan pengajaran: Akademisi dapat mengintegrasikan pemahaman Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan, baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Selain itu, mereka juga dapat mengadakan seminar, lokakarya, dan diskusi terbuka untuk memperluas pemahaman dan kesadaran tentang Pancasila.
3. Penyebaran informasi: Akademisi juga dapat berperan sebagai agen penyampai informasi tentang Pancasila kepada masyarakat. Mereka dapat menulis artikel, buku, atau membuat konten digital yang dapat diakses oleh khalayak luas.
4. Advokasi dan konsultasi: Akademisi dapat menjadi advokat Pancasila dalam dialog publik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Mereka dapat berperan dalam diskusi kebijakan publik, memberikan masukan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dan mengadvokasi perlindungan terhadap nilai-nilai tersebut dalam kerangka globalisasi.
5. Dan Penasehat Kebijakan: Akademisi dapat berperan sebagai penasehat kebijakan pemerintah dalam mengembangkan kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan globalisasi. Mereka dapat memberikan wawasan dan masukan berdasarkan penelitian dan analisis

akademik untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan tujuan Pancasila⁵⁷

Menurut Ibu Rizkika Lhena Darwin, menegaskan bahwa semua darikita memiliki kewajiban yang sama dalam menjaga keutuhan pancasila.

*“Pada dasarnya semua dari kita punya kewajiban yang sama merawat aktualisasi Pancasila berjalan sebagaimana mestinya mulai dari level keluarga hingga masyarakat. Sebagai akademisi, terdapat tiga fasilitas yang dapat digunakan untuk menjaga eksistensi Pancasila yaitu melalui Pendidikan (ruang akademik formal dan informal, penelitian (menghasilkan riset dan publikasi), dan pengabdian (memberi pemahaman dengan masyarakat secara luas)”.*⁵⁸

Dari uraian diatas memberikan kita pesan bahwa peran dan andil akademisi menjadi sangat penting dalam menjaga keutuhan nilai-nilai pancasila di tengah gempuran globalisasi yang terus berjalan hingga saat ini. dan dalam upaya menjaga keutuhan tersebut, maka harus adanya perhatian serius bukan hanya dari pemerintah tetapi juga kita sebagai warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang diamanatkan oleh pancasila.

⁵⁷ Sugianto, A. (2018). Pancasila Values in Globalization Era: the Role of Education

⁵⁸ Wawancara dengan Dosen FISIP UIN Ar-Raniry, Ibu Rizkika Lhena Darwin pada tanggal : 30 Maret 2023.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya tentang “Pancasila sebagai Ideologi Negara (studi kasus: Akademisi FISIP UIN Ar-Raniry)”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akademisi FISIP UIN Ar-Raniry melihat pancasila sebagai landasan filosofis dan moral yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai yang terkandung dalam pancasila disesuaikan dengan karakteristik masyarakat indonesia yang multikulturalisme. Kandungan nilai yang universal seperti nilai persatuan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai ketuhanan, dan kebebasan mengemukakan pendapat (demokrasi). Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa Implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila belum berjalan dengan optimal di masyarakat karena masih adanya berbagai tantangan dan hambatan baik itu dari dalam maupun dari luar.
2. Akademisi FISIP UIN Ar-Raniry melihat bahwa walaupun tantangan yang dihadapi pancasila sangat banyak, tetapi kandungan nilai pancasila masih sangat relevan dengan karakteristik masyarakat indonesia yang majemuk. Tentunya perlu dilakukan langkah-langkah bersama dalam menjaga eksistensi pancasila terus teraktualisasi dengan baik dan benar. Dengan peningkatan pendidikan yang baik dan berkualitas menjadi fondasi dalam menjaga dan merawat Pancasila di era globalisasi. Pendidikan memiliki

peran peran dalam memperkuat pemahaman, kesadaran, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat, terutama generasi muda.

5.2. Saran

1. Penulis menyadari dalam proses penulisan skripsi “Pancasila Sebagai Ideologi Negara (Studi Kasus Akademisi FISIP UIN Ar-Raniry) masih adanya kekurangan dan juga masih perlu untuk dilakukan penelitian lanjutan agar penelitian ini dapat berkembang dan bermanfaat bagi pembaca. Namun, dengan adanya penelitian sederhana ini penulis sangat berharap bisa memberikan manfaat serta sumbangan ilmu pengetahuan baru untuk umum dan khususnya bagi mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry.
2. Harapannya agar peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini serta skripsi ini dapat berguna bagi semua orang dalam menunjang pengetahuan keilmuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Mu'id Aris Shofa dkk., *"Praktik Pembumian Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Generasi Muda"* Vol.2, No.1, April 2019, Hal 1-5.
- Aini Shifana Savitri & Dinie Anggraeni Dewi, *"Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan di Era Globalisas"*, Vol.5, No.2, September 2021, Hal 170-171
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018) hlm. 8
- Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1978).
- Anita Rinawati, *"Transformasi Pendidikan untuk Menghadapi Globalisasi"*, Vol.3, No.1, juni 2015, Hal.95.
- Ardianto, E., & Anees, B.Q. (2007) *Filsafat Ilmu Komunikasi*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media), hlm. 83.
- Ega Regiani dan Dinie Aggraeni Dewi, *"Pudarnya Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Masyarakat di Era Globalisasi"*, Vol.5 No. 1 Juni 2021, hlm. 32.
- Rini Setyowati, Buyung, Dewi Mariana, Mertika. *Pendidikan Pancasila*, (STKIP Karawang: Lakeisha) ,29 januari 2020, Hlm 22.
- Elly Rosana, *Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, (jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016) hlm. 42.
- Erna Septomowati, *Persepsi dan Aspirasi terhadap pendidikan Pancasila di perguruan tinggi (studi pada Dosen dan mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta)*, (Surakarta : FKIP-USM, 2010)
- Friedman, T. L. *The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization*, (New York: Anchor Books, 2000), hlm. 5.
- H.Firman Yudhanegara, *Pancasila Sebagai Filter Pengaruh Globalisasi Terhadap Nilai-Nilai Nasionalisme*, Vol.8, No.2, Juli-Desember 2015. Hal.169.
- Sugianto, A. (2018). Pancasila Values in Globalization Era: the Role of Education, IJEE (Indonesian Journal of English Education), Vol.5, No.2, Hal 253.
- Handy Yoga Raharja, *"Relevansi Pancasila Era Industry 4.0 dan Society 5.0"*, Vol.2, No.1, Maret 2019, Hal.18

- Hanum, F.F (2019). Pendidikan Pancasila Bagi Generasi Milenial. Dalam A.Wahyudi, R.Nababan, & F.Rahman (editor), *Prosiding Seminar Nasional: Reaktualisasi Konsep Kewarganegaraan Indonesia; Digital Library, 15 Oktober 2019* (hlm.72-81). Medan: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.
- Joko Purnomo, Irza Kurunin, Raissa Ardianti, *Globalisasi dan Politik Perkembangan Internasional*, (malang: UB Press, 2017), hlm. 21
- Larrain, Jorge. Konsep ideologi, (di indonesiakan oleh Ryadi Gunawan dari buku *The Concept of Ideology*. Yogyakarta:LKPSM, 1997)
- M. Sastrapratedja, *Pancasila sebagai visi dan refrensi kritik sosial*.(Yogyakarta,penerbit: Universitas Sanata Dharma, 2001) hlm.51.
- Supratiknya, A. (2005). *Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Nasional: Pengertian, Fungsi, dan Peranannya*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.35, No.4, Hal. 439-449.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia, 1989) halm. 39.
- Munir,MBM, Umi Salamah, dan Suratman. (2015) *Pendidikan Pancasila*. (Malang: Mardani Media)
- Ratna Sari & Fatma Ulfatun Najicha, “Memahami Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Kehidupan Masyarakat”, Vol. 7, No.1 April 2022
- Rizki Rahmadini Nurika, *Peran Globalisasi dibalik Munculnya Tantangan baru bagi Diplomasi di Era Kontemporer*, Vol.3 No.1 (januari-juni, 2017), hlm. 127.
- Ronto,S.Pd.I.,M.Si, *Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara* (Jakartatimur: PT Balai Pustaka, 2012), hlm.11
- Rowland Bismark Fernando Pasaribu, *Pancasila Sebagai Ideologi Nasional*, (2013) hlm. 59-60
- Silverius Y Soeharso, Aisyah, *Hubungan Persepsi dan Sikap Civitas Akademika terhadap Kesesuaian Peraturan Perundangan dengan Pancasila*, Vol. 12, No.1, Juni 2021, hlm. 53-64.
- Suhandji & Waspada TS, (2004), *Administrasi Pemerintahan Desa*. (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Suhandji, (2004). *Modernisasi dan Globalisasi; Studi Pembangunan dalam Perspektif Global*. (Bandung, Insan Cendikia), hlm. 27

Suwarno, P.J. *Pancasila budaya bangsa indonesia* (Yogyakarta: penerbit kanisius, 1993)

Tatar Bonar Silitonga, *Tantangan Globalisasi, peran negara, dan implikasinya terhadap aktualisasi nilai-nilai ideologi negara*, Vol.17, No. 1 januari 2020, hlm. 15-28

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), hlm. 5-7

Undang-undang :

UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Website :

<https://www.kemdikbud.go.id/>. diakses pada 10 juli 2023, pukul 14:00 WIB

<http://fisip.uin-ar-raniry.ac.id/>. diakses pada 5 maret 2023, pukul 10:00 WIB

<http://kbbi.web.id/perpsektif.html> diakses pada tanggal 11 maret 2023, puku 15:00 WIB

<https://bpip.go.id/> . diakses pada tanggal 11 maret 2023, pukul 22:20 WIB.

<https://www.studocu.com/id/document/universitas-muhammadiyah-malang/pancasila/pengertian-ideologi/28725075>. Diakses pada 23 februari 2023, pukul 17:00 WIB.

<http://fisip.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/sejarah>. Diakses pada tanggal 11 Maret 2023, pukul 15:28 WIB.

Sumber Wawancara :

Wawancara dengan Bapak Arif Akbar (Dosen FISP UIN Ar-Raniry), pada tanggal 31 Maret 2023.

Wawancara dengan Bapak Mirza Fanzikri (DOsen FISIP UIN Ar-Raniry), pada tanggal 4 April 2023.

Wawancara dengan Bapak Said Amirul Kamar (Dosen FISIP UIN Ar-Raniry), pada tanggal 1 April.

Wawancara dengan Ibu Aklima (Dosen FISIP UIN Ar-Raniry), pada tanggal 3 April 2023.

Wawancara dengan Ibu Cut Zamharira (Dosen FISIP UIN Ar-Raniry), pada tanggal 5 April 2023.

Wawancara dengan Ibu Muazzinah (Dosen FISIP UIN Ar-Raniry), pada tanggal 3 April 2023.

Wawancara dengan Ibu Rizkika Lhena Darwin (Dosen FISIP UIN Ar-Raniry), pada tanggal 30 Maret 2023.



Lampiran I

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Rizkika Lhena Darwin pada tanggal 30 Maret 2023.



Wawancara dengan Bapak Arif Akbar pada tanggal 31 Maret 2023..



Wawancara dengan Bapak Sais Amirul Kamar pada tanggal 1 April 2023



Wawancara dengan Ibu Aklima pada tanggal 3 April 2023



Wawancara dengan Ibu Muazzinah pada tanggal 3 April 2023



Wawancara dengan Bapak Mirza Fanzikri pada tanggal 4 April 2023



Wawancara dengan Ibu Cut Zamharira pada tanggal 5 April 2023.

Lampiran II

RIWAYAT HIDUP

- 
1. Nama : Sapia
 2. Tempat/Tanggal Lahir : Krueng Ayon/02-Februari-2000
 3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 4. Agama : Islam
 5. Alamat : Desa Krueng Ayon, Kec. Sampoiniet, Kab.
Kab.Aceh Jaya
 6. Status : Belum Nikah
 7. Orang Tua,
 - a. Nama Ayah : Mustafa (Alm)
 - b. Nama Ibu : Samiah
 - c. Alamat : Desa Krueng Ayon, Kec. Sampoiniet, Kab.
Aceh Jaya
 - 7 Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Negeri 9 Sampoiniet, Aceh Jaya, Tahun 2012
 - b. SMPS Darul Abrar, Aceh Jaya, Tahun 2015
 - c. SMAS Inshafuddin, Banda Aceh, Tahun 2018
 - d. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Tahun 2023

Banda Aceh 10 Juli 2023

Sapia